

**KEKUASAAN DAN LEGITIMASI POLITIK ISLAM MENURUT
PERSPEKTIF PEMIKIRAN IBNU KHALDUN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Strata 1 (S.1) Pada Fakultas
Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Oleh :

M. RUSDIANTO
NIM : 44143003

**PROGRAM STUDI
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**



PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**KEKUASAAN DAN LEGITIMASI POLITIK ISLAM MENURUT
PERSPEKTIF PEMIKIRAN IBNU KHALDUN**

Oleh :

M. RUSDIANTO
NIM : 44143004

Dapat Disetujui Dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata-1 (S.1) Pada Program Studi Pemikiran Politik Islam

Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

UIN Sumatera Utara

Medan

Pembimbing I

Pembimbing II

Suheri Harahap, M.Si
NIP. 19721013 199803 1 003

Dr. Zulkarnaen, M.Ag
NIP. 19740111 200312 1 006

SURAT PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan Pembimbing II yang Ditugaskan Untuk Membimbing Skripsi dari Mahasiswa :

Nama : **M. Rusdianto**
Tempat/Tgl. Lahir : Subulussalam, 08 Juli 1996
NIM : 44.14.3.003
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Judul Skripsi : **Kekuasaan dan Legitimasi Politik Islam
Menurut Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun**

Berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku yang selanjutnya dapat dimunaqasyahkan.

Medan, November 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Suheri Harahap, M.Si
NIP. 19721013 199803 1 003

Dr. Zulkarnaen, M.Ag
NIP. 19740111 200312 1 006

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : “**Kekuasaan Dan Legitimasi Politik Islam Menurut Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun**”, M. Rusdianto NIM. 44143003 Pemikiran Politik Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah sarjana (S1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam pada tanggal 9 November 2019.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Pemikiran Politik Islam.

Medan, 9 November 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Sarjana (S1) Fak. Ushuluddin
dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Arifinsyah, M.Ag
NIP. 19680909 199403 1 004

Ismet Sari, M.A
NIP. 19740110 200710 1 002

Anggota Penguji :

1. **Dr. Syukri, M.A**
NIP. 19700302 199803 1 005

2. **Dr. Zulkarnaen, M.Ag**
NIP. 19740111 200312 1 006

3. **Dr. Adenan, M.A**
NIP. 19690615 199703 1 002

4. **Drs. Muhammad Aswin, MAP**
NIP. 19680817 200312 1 003

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam

Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag
NIP. 19650705 199303 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rusdianto
NIM : 44.14.3.003
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Tempat/Tgl. Lahir : Subulussalam, 8 Juli 1996
Alamat : Jl. Brigjen Katamso Gg. Perbatasan No. 39

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : ***“Kekuasaan dan Legitimasi Politik Islam Menurut Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun”*** benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan

M. RUSDIANTO

NIM. 44143003



Nama : M. Rusdianto
NIM : 44.14.3.003
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Islam
Jurusan : Pemikiran Politik Islam
Pembimbing I : Suheri Harahap, M.Si
Pembimbing II : Dr. Zulkarnaen, M.Ag
Judul Skripsi : **Kekuasaan dan Legitimasi Politik Islam Menurut Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun**

ABSTRAK

Kompetisi politik biasanya tidak terlepas dari sikap-sikap arogan untuk memperoleh kekuasaan, dimana pemegang kebijaksanaan dari perseorangan atau kelompok yang berkuasa senantiasa mencari legitimasi kemenangan dari masa dengan berbagai manuver siasat atas kelompok, profesi bahkan agama. Namun, dalam kaca mata Ibnu Khaldun politik justeru sebagai media untuk mempertahankan solidaritas universal. Menurutnya, kekuasaan terbentuk melalui kemenangan atas suatu kelompok.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana latar belakang kehidupan Ibnu Khaldun dan dasar pemikiran Ibnu Khaldun tentang kekuasaan dan legitimasi politik. Jenis penelitian ini adalah *library research*. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku yang memuat informasi langsung tentang pemikiran Ibnu Khaldun tentang kekuasaan dan legitimasi serta latar belakang kehidupannya. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan referensi dan tautan yang berkaitan dengan pemikiran politik Ibnu Khaldun. Dalam menganalisa data menggunakan data kualitatif, yaitu dengan cara induktif yaitu mendeskripsikan informasi secara umum lalu kerucutkan sehingga menghasilkan tujuan yang hendak dicapai.

Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun muncul karena fitrah manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan sebagai pembeda dengan binatang. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan manusia atas seseorang yang mengatur peradaban yang sudah ada. Untuk melanggengkan peradaban manusia, *ashabiyah* sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup. *Ashabiyah* merupakan jalinan sosial yang dapat membangun kesatuan bangsa sehingga menciptakan solidaritas sosial.

Kata Kunci : Kekuasaan, Legitimasi, Ibnu Khaldun

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Segala puji dan syukur kehadirat Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Kekuasaan dan Legitimasi Politik Islam Menurut Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun”***, kemudian shalawat teriring salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw. keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. Amin.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa, Mama dan Papa yang telah menjadi orang tua terhebat sejadat raya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta do'a yang tentu takkan bisa penulis balas. Untuk kakak saya Abidah Ayu, M.Psi terimakasih banyak telah menjadi bagian dari motivator yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prof. H. Saidurrahman, M.Ag, beserta jajarannya
3. Jajaran Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Beserta seluruh pegawai yang turut menjadi bagian dari Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam.
4. Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam Bapak Drs. Muhammad Aswin, MAP, Sekretaris Jurusan, beserta seluruh Dosen dan Staf Jurusan

Perbandingan Agama. Semoga ilmu yang diajarkan kepada penulis dapat menjadi amal jariyah untuk kesejahteraan hidup dikemudian hari.

5. Bapak Suheri Harahap, M.Si selaku Dosen pembimbing I. Terimakasih, atas keluangannya untuk diganggu disela-sela waktu senggangnya. Juga kepada Bapak Zulkarnaen, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan rapi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam yang telah banyak mengajarkan ilmunya kepada kami para mahasiswa yang terkadang lebih banyak bebalnya daripada patuh, semoga setelah ini kami bisa jauh lebih baik, Aamiin. Serta seluruh Staf akademik yang membantu penulis dalam urusan administrasi dan lain-lain, terimakasih atas kemudahan urusan yang disediakan.
7. Helmaya Rosa dan teman-teman seperjuangan di Program Studi Pemikiran Politik Islam '14
8. Teman-teman di *club* badminton yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk segera merampungkan skripsi ini

Akhirnya, hanya Allah Swt. yang dapat membalas semua kebaikan orang-orang hebat atas bantuan dan dukungan kepada penulis. Semoga jerih payah penyusunan dalam penulisan skripsi ini mendapatkan sambutan baik dari para pembaca dan dapat bermanfaat bagi semua orang dan terutama sekali mendapat keridhoan Allah Swt. *amin Ya Robbal Alamin.*

Medan, Oktober 2018

M. Rusdianto
NIM. 44143003

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN DOSEN	ii
PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Istiah	8
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Telaah Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II LATAR BELAKANG KEHIDUPAN IBNU KHALDUN

A. Biografi Ibnu Khaldun	18
B. Karya Ibnu Khaldun	21
C. Pemikiran Politik Ibnu Khaldun.....	26

BAB III KEKUASAAN DAN LEGITIMASI POLITIK

A. Konsep Kekuasaan Politik	30
1. Pengertian Kekuasaan.....	30
2. Dimensi kekuasaan	31
3. Jenis-Jenis Kekuasaan	35
B. Konsep Legitimasi Politik.....	40
1. Pengertian Legitimasi	40
2. Objek Legitimasi	41
3. Tipe-Tipe Legitimasi	43

**BAB IV KEKUASAAN DAN LEGITIMASI POLITIK ISLAM MENURUT
PERSPEKTIF PEMIKIRAN IBU KHALDUN**

A. Dasar Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kekuasaan Dan
Legitimasi Politik47

B. Kekuasaan Politik Menurut Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun53

C. Legitimasi *'Ashabiyah* Menurut Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun.....58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan63

B. Saran64

DAFTAR PUSTAKA66

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran politik Islam pada dasarnya dimaksudkan sebagai cara untuk menengahi problem umum tentang hubungan antara Islam dan politik (negara). Pemikiran politik Islam modern cenderung mengalami evolusi.¹ Evolusi pemikiran politik itu didesain oleh perbedaan latar belakang pemikirnya, Din Syamsuddin menyebutkan tiga kecenderungan; *pertama*, kecenderungan juristik yang diusulkan oleh para fuqaha yang cenderung memandang permasalahan kekhalifahan dan masalah lain yang terkait dengannya dari kacamata syariah (hukum Islam). *Kedua*, kecenderungan birokratik-administratif dari para penulis (*kutab*) yang umumnya berhubungan dengan teori-teori birokrasi dan administrasi negara. *Ketiga*, kecenderungan filosofis yang mendefenisikan ide para filsuf (*falsifah*) yang mengemukakan konsep negara yang ideal (*al madinah al fadilah*).²

Perlu adanya semacam rekonstruksi pemikiran dan praksis politik yang signifikan untuk “menemukan” kembali wajah Islam politik yang bersifat responsif bagi tata dunia yang berubah, bagi sistem politik yang adil dan demokratis serta bagi suatu sistem ketatanegaraan yang ideal. Tuntutan untuk mengontekstualkan ajaran Islam dalam kehidupan sosial dan politik merupakan kehendak umum yang berkembang dalam masyarakat.

¹Imara menyebutkan bahwa Islam sebagai agama tidak menentukan suatu sistem pemerintahan tertentu bagi kaum muslim, karena logika kesesuaian agama ini untuk sepanjang masa dan tempat menuntut agar soal-soal yang selalu akan berubah oleh kekuatan evolusi harus diserahkan kepada akal manusia (untuk memikirkannya), dibentuk menurut kepentingan umum dan dalam rangka prinsip-prinsip umum yang telah digariskan agama ini, dalam Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 92

² Din Syamsuddin, *Islam Dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta: Logos, 2001),h. 93

Refleksi sosiologis atas dinamika pemikiran dan aksi berpolitik yang dijelaskan sebelumnya merupakan bagian dari perkawinan makna doktrin sosial yang yang berubah, oleh karena itu untuk menetralsir pemikiran-pemikiran yang akan tumpang tindih, Ibnu Khaldun meletakkan persoalan kontekstual sebagai alternatif dari sumber legitimasi politik, selain alasan-alasan syariah. Ibnu Khaldun pada masanya melihat adanya proses “pengikisan” peran-peran syariah dalam politik, Khaldun memberikan suatu alternatif bagi persoalan aktual atas tuntutan syariah dengan kenyataan politik, ia menunjukkan analisis materialistik yakni analisis ekonomi-politik, atas gejala-gejala politik. Alternatif yang ditawarkan Ibnu Khaldun adalah pendekatan dalam mempertemukan tuntutan ideal wahyu dan realitas politik.

Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh intelektual Muslim yang dianggap sebagai peletak dasar ilmu-ilmu sosial. Namanya tidak hanya terkenal di dunia Islam, tetapi juga dikalangan non – Muslim. Ia adalah sejarawan, ahli politik, sosiolog, ahli fiqh, hakim, dan sederatan gelar lainnya yang layak disandangkan kepadanya. Menurut catatan Ahmad Syafii Maarif, sampai akhir tahun 1970-an saja tidak kurang dari 854 buku, artikel, *review*, disertasi, dan bentuk publikasi ilmiah lainnya yang ditulis oleh sarjana Islam maupun Barat (orientalis) tentang Ibnu Khaldun.³

Ibn Khaldun adalah seorang politisi yang menghasilkan karya pemikiran teori politik tentang bagaimana terbentuknya suatu kekuasaan serta menjadi legitimasi atas kekuasaan tersebut. Kemampuannya dibidang politik sehingga Ibn

³ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Ed. Ketiga, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 40-41

Khaldun mampu meraih jabatan politik pada berbagai proses tertentu. Pemikiran-pemikiran yang dihasilkan dalam teori sosialnya melahirkan persepsinya tentang kekuasaan dan legitimasi politik.

Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun sebenarnya terbentuk melalui kemenangan suatu kelompok tertentu atas lainnya. Kekuasaan itu merupakan kedudukan yang menyenangkan, meliputi berbagai kesenangan materi maupun maknawi, material maupun spiritual, *visible* maupun *invisible* sehingga untuk mendapatkannya seringkali melalui kompetisi-kompetisi menggemparkan dan sedikit orang yang mau menyerahkannya.⁴ Selanjutnya, Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa pemimpin sebagai pemilik kekuasaan berperan sebagai penanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan kesatuan sosial, dan mencegah dari hal-hal yang dapat merusak. Untuk itu pemimpin dibutuhkan sebagai pengganti Nabi menyeru kepada kewajiban Islam dan menegakkannya bersama-sama.⁵

Kompetisi kekuatan antar kelompok biasanya tidak dapat dilepaskan dari sikap-sikap arogan untuk memperoleh kekuasaan tersebut, dimana pemegang kebijaksanaan dari perseorangan atau kelompok yang berkuasa senantiasa mencari legitimasi kemenangan dari masa dengan berbagai macam manuver siasat atas kelompok, profesi, bahkan agama. Kekuasaan dan politik menurut Ibnu Khaldun memiliki tujuan substansial yang seharusnya diformulasikan untuk kemanusiaan, karena keduanya secara naluri berkait dengan fitrah manusia.⁶

⁴Al-Allamah Abdurrahman Bin Muhammad Bin Khaldun, *Mukaddimah*, Terj. Masturi Irham,Dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. vii

⁵ Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Kerucut Kekuasaan Pada Zaman Awal Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016), h.93

⁶ Al-Allamah Abdurrahman Bin Muhammad Bin Khaldun, *Mukaddimah*, h. vii

Menurut sumbernya, kekuasaan meliputi : posisi, sifat personal, keahlian, dan peluang untuk mengontrol informasi.⁷ Menurutnya, Kekuasaan adalah konsep yang berhubungan erat dengan masalah pengaruh, persuasi, manipulasi, koersi, kekuatan, dan kewenangan. Kekuasaan juga bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sehingga menyebabkan orang lain bertindak sesuai dengan keinginan orang yang memiliki kekuasaan itu.⁸

Menurut Muhammad Abduh, kekuasaan politik harus didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat ini dibangun atas prinsip-prinsip: a. kebebasan, b. demokrasi dan c. konstitusi yang berfungsi sebagai landasan sistem politik dalam pemerintahan.⁹ Menurutnya, Islam tidak mengenal adanya kekuasaan agama, dalam arti: a) Islam tidak memberikan mandat kepada siapapun untuk menindak orang lain atas nama agama atau Tuhan, b) Islam tidak membenarkan campur tangan penguasa dalam urusan agama, c) Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan penafsirannya tentang agama.¹⁰

Mendukung pernyataan Muhammad Abduh, Abul A'la al-Maududi yang memunculkan konsep "teodemokrasi". Pokok-pokok pikiran yang melandasi pemikirannya adalah, pertama, Islam adalah suatu agama yang lengkap dan paripurna, mengatur semua aspek kehidupan termasuk politik. Kedua, kedaulatan/kekuasaan tertinggi ada di tangan Allah, untuk itu sebagai

⁷Wirawan dalam Eman Hermawan. *Politik Membela yang Benar : Teori, Kritik, Dan Nalar*, (Yogyakarta: Klik dan DKN Garda Bangsa, 2001), h. 5

⁸*Ibid*, h. 5

⁹ Muhammad Abduh dalam M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos 2000), h. 167

¹⁰Muhammad Azhar, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h.108

manifestasinya manusia dan negara harus tunduk kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ketiga, sistem politik Islam adalah sistem universal serta tidak mengenal ikatan/batasan geografi, bahasa dan kebangsaan.¹¹

Abul A'la al-Maududi juga menetapkan tauhidiah sebagai dasar utama dari sebuah negara Islam. Maksudnya, kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi, berada di tangan Allah. Dan bahwa pemerintahan kaum mukminin pada dasarnya dan pada hakekatnya adalah khilafah atau perwakilan, dan bukannya pemerintahan yang lepas kendalinya dalam segala yang diperbuat, tetapi ia haruslah bertindak di bawah undang-undang Ilahi yang bersumber dan diambil dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.¹²

Pernyataan yang sama juga di utarakan oleh Al-Ghazali¹³, yang merujuk pada QS. Ali Imran ayat 26 sebagai berikut :

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مِنْ دَشَاءٍ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ دَشَاءٍ
وَتُعِزُّ مَنْ دَشَاءٍ وَتُدِلُّ مَنْ دَشَاءٍ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

*"Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan (kekuasaan), Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."*¹⁴

Perihal gagasan Ibnu Khaldun tentang kekuasaan dan legitimasi politik merupakan suatu bentuk perkembangan pemikiran dibidang politik yang banyak

¹¹Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara*, cet. ke-5 (Jakarta: UI Press, 1993), h.168

¹²Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, terj. M. al-Baqir, cet. ke-6 (Bandung: Mizan, 1996), h. 93

¹³ Kekuasaan hanya milik Allah, dalam Eman Hermawan. *Politik Membela yang Benar*, h.230

¹⁴ Al-Qur'an Cordoba, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2017)

dipelajari saat sekarang ini ketika seseorang akan terjun kedalam dunia politik praktis. Ibnu Khaldun telah menyajikan konsep yang luas dalam menafsirkan, mengelola, dan mengaplikasikan kekuasaan itu dalam realitas sosial.

Eman Hermawan menyebutkan, salah satu sumber kekuasaan yang lain adalah legitimasi. Legitimasi berarti suatu aturan yang menyangkut keabsahan atau mengandung pengakuan secara formal dan merupakan kualitas otoritas yang dianggap benar atau sah. Ada kode hukum tersendiri yang diciptakan untuk membuat suatu tindakan dianggap sah atau menyimpan. Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, legal dan legitim. Jadi secara sederhana legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan perbuatan dengan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etis, adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah.¹⁵

Suatu sistem politik dapat lestari apabila sistem politik secara keseluruhan mendapatkan dukungan, seperti penerimaan dan pengakuan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi diperlukan bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk unsur-unsur sistem politik yang ada. Yang menjadi obyek legitimasi bukan hanya pemerintah, tetapi juga unsur-unsur lain dalam sistem politik. Menurut Easton, terdapat tiga objek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tidak hanya berlangsung secara terus menerus, tetapi mampu pula mentransformasikan tuntutan menjadi

¹⁵Eman Hermawan. *Politik Membela yang Benar*, h. 6

kebijakan umum. Ketiga obyek legitimasi itu meliputi: komunitas politik, rezim dan pemerintahan.¹⁶

Dalam Islam, Politik merupakan media untuk mempertahankan solidaritas universal. Karena Islam adalah agama universal, pemerintahan adalah lembaga keagamaan sehingga dengan demikian politik dapat digunakan untuk mempertahankan solidaritas universal.¹⁷ Agar ditemukan pemaknaan secara lebih luas, penulis akan merujuk kepada tulisan-tulisan yang dirujuk kepada pemikiran politik Ibnu Khaldun tentang kekuasaan dan legitimasi politik sehingga dapat diketahui bagaimana implementasinya terhadap Islam.

Dari latar belakang tersebut, dengan demikian disusunlah sebuah judul penelitian : ***“Kekuasaan Dan Legitimasi Politik Islam Menurut Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan tentang Kekuasaan Dan Legitimasi Politik Islam Menurut Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun. Adapun yang menjadi fokus pertanyaan dalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana riwayat kehidupan dan pemikiran politik Ibnu Khaldun ?
2. Bagaimana kekuasaan dan legitimasi politik Islam menurut perspektif pemikiran Ibnu Khaldun?

¹⁶Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 93

¹⁷Rasyid Ridha dalam M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik di Era Orde Baru*, (Jakarta: Logos, 2001), h.123-125

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul skripsi ini, maka perlu diberikan batasan istilahnya agar maksud dari judul dapat dipahami bersama, adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Kekuasaan

Secara etimologi kekuasaan berasal dari bahasa Inggris yang berarti *power* yang memiliki makna kemampuan berbuat dan bertindak. Menurut Dahl *power* identik dengan *influence*, *authority*, and *rule*.¹⁸ Dalam perbendaharaan ilmu politik terdapat jumlah konsep yang berkaitan erat dengan konsep kekuasaan (*power*), seperti *influence* (pengaruh), persuasi (*persuasion*), manipulasi, *coercion*, *force*, *authority* (kewenangan).¹⁹ Secara umum kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi.

2. Legitimasi

Secara etimologi legitimasi berasal dari bahasa latin yaitu *lex* yang berarti hukum. Secara istilah legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan.²⁰ Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Secara konseptual,

¹⁸M. Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik : Perbincangan Kepemimpinan Dan Kekuasaan*, (Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.[lembar transliterasi]

¹⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, h. 71

²⁰Eman Hermawan. *Politik Membela Yang Benar*, h. 6

legitimasi politik didefinisikan sebagai kepercayaan pada diri orang-orang yang diperintah terhadap hak moral untuk memerintah dan orang-orang yang memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah itu.²¹

3. Politik

Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota atau komunitas secara keseluruhan. Konsep tentang *polis* adalah proyek idealis Plato (428-328 SM) dan Aristoteles (384-322 SM). Dari bukunya “The Republic”, kita dapat dengan mudah memahami bahwa tujuan Plato melalui konsep ini adalah terciptanya masyarakat ideal. Politik kemudian diartikan sebagai semua usaha dan aktivitas untuk membangun dan mewujudkan masyarakat yang ideal atau lebih baik dibandingkan dengan kondisi sekarang. Selanjutnya, Aristoteles dalam bukunya *The Politics* menyatakan bahwa ‘*man is by nature a political animal*’. Sehingga, politik bukanlah konsep yang diciptakan, melainkan sesungguhnya bisa ditemukan dalam diri setiap orang.²²

4. Ibnu khaldun

Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh intelektual Muslim yang dianggap sebagai peletak dasar ilmu-ilmu sosial. Namanya tidak hanya terkenal di dunia Islam, tetapi juga dikalangan non – Muslim. Ia adalah sejarawan, ahli politik, sosiolog, ahli fiqh, hakim, dan sederatan gelar lainnya yang layak disandangkan kepadanya. Menurut catatan Ahmad Syafii Maarif, sampai akhir tahun 1970-an saja tidak kurang dari 854 buku, artikel, *review*, disertasi, dan

²¹Syahrul Hidayat, *Mengislamkan Negara Sekuler : Partai Refah, Militer, Dan Politik Elektoral Turki*, (Jakarta: Kencana, 2015),h. 31

²²Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi Dan Positioning, Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, ed. 2, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 49

bentuk publikasi ilmiah lainnya yang ditulis oleh sarjana Islam maupun Barat (orientalis) tentang Ibnu Khaldun.²³

Dari definisi istilah-istilah di atas, maka adapun maksud penulis dengan judul penelitian “Kekuasaan dan Legitimasi Politik Islam Menurut Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun” adalah mendeskripsikan pemikiran politik Ibnu Khaldun yang fokus objek penelitiannya adalah mengenai kekuasaan dan legitimasi dalam kaca mata politik Islam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Riwayat kehidupan dan pemikiran politik Islam Ibnu Khaldun.
2. Kekuasaan dan legitimasi politik Islam menurut perspektif pemikiran Ibnu Khaldun.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka adapun kegunaan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis :
 - a) Pengembangan keilmuan tentang kekuasaan dan legitimasi menurut pemikiran Ibnu Khaldun, khususnya di Jurusan Pemikiran Politik Islam UIN Sumatera Utara

²³ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam*, h. 40-41

- b) Memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang terkait tentang kekuasaan dan legitimasi politik menurut perspektif pemikiran Ibnu Khaldun
- c) Menambah referensi bagi peneliti lain atau peneliti lanjutan, dengan objek yang sama dengan sudut pandang berbeda.

2. Secara praktis :

- a) Bagi Mahasiswa, memberi informasi dan inspirasi tentang kekuasaan dan legitimasi politik Islam dalam pandangan Ibnu Khaldun sehingga menjadi salah satu sumber referensi.
- b) Bagi Jurusan Pemikiran Politik Islam, sebagai informasi dan bahan pertimbangan dalam penyusunan skripsi tentang pemikiran politik Islam Ibnu Khaldun khususnya tentang kekuasaan dan legitimasi politik Islam sehingga diharapkan dapat menghasilkan topik-topik lain yang berkenaan dengan pemikiran politik Ibnu Khaldun.

F. Telaah Pustaka

Buku yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, antara lain:

Al-Allamah Abdurrahman Bin Muhammad Bin Khaldun, *Mukaddimah*, Terj. Masturi Irham, Dkk, merupakan buku rujukan utama dalam penelitian ini, karena buku ini merupakan karya Ibnu Khaldun yang Beliau tulis sendiri. Buku ini akan membantu penulis melihat secara jelas bagaimana pemikiran politik Ibnu Khaldun, bagaimana pandangan Ibnu Khaldun tentang kekuasaan dan legitimasi politik. Sebab karya yang berjudul *Al-Muqaddimah* merupakan rangkuman pemikiran yang mengungkap tentang karier politik Ibn Khaldun selain karya

sejarah dan sosiologinya. Pandangan-pandangan tentang kekuasaan dan legitimasi juga tersirat dalam Muqaddimahnyanya.

Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, adalah buku yang berisi pemikiran-pemikiran politik dari sejarah masa Rasulullah, sampai pada kontemporer di Indonesia. Dalam buku ini banyak tokoh muslim yang di sadur pemikirannya sehingga dapat dijadikan bahan rujukan tambahan atas pemikiran politik Ibnu Khaldun serta implementasinya di masa lampau hingga sekarang. Buku ini kaya akan beberapa tokoh Islam yang dideskripsikan pemikiran dan sejarah hidupnya sehingga dapat menjadi rujukan tambahan untuk beberapa tokoh pemikiran politik Islam lain sehingga memperkaya penelitian ini.

Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Buku ini merupakan karya Barat yang menulis tentang pemikiran politik Islam dari masa Rasulullah sampai kepada tokoh-tokoh politik Muslim yang pernah ada di dunia. Penulis mengulas sejarah kepemimpinan dan sepak terjang politik dari Masa Rasulullah hingga beberapa tokoh politik Muslim. Selain menjadi sumber tambahan yang lain, juga dapat digunakan sebagai penguat referensi sebelumnya dari buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh Islam.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, buku ini merupakan buku rujukan mahasiswa dalam mengetahui dasar-dasar politik untuk mengetahui definisi operasional secara etimologi maupun secara konseptual tentang istilah-istilah dalam politik sehingga dapat menjadi pembandingan dengan definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Buku ini sebagai dasar untuk mengetahui

beberapa definisi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Barat yang berkaitan tentang kekuasaan dan legitimasi dalam politik sehingga dapat deskripsikan bukan hanya dalam sudut pandang Islam tetapi juga dalam sudut pandang tokoh-tokoh Barat.

M Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik*, dalam bukunya menjadi pemimpin politik yang membahastentang konsep kepemimpinan serta bagaimana seharusnya kekuasaan itu dijalankandan menawarkan manajemen kepemimpinan politik. Kaitannya dengan karangan iniadalah bagaimana kekuasaan itu lahir, berkembang dan sirna. Dalam buku ini dapat digunakan sebagai pembanding bahwa beberapa teori mengenai pemimpin sebagai pemegang kekuasaan sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakatnya, menjalankan kepemimpinannya sampai faktor keruntuhan kekuasaannya.

Eman Hermawan, *Politik Membela Yang Benar*, merupakan bukuyang memberikan definisi mendasar tentang politik, kekuasaan dan legitimasi. Sehingga dapat dijadikan sebagai pembanding antara definisi dari beberapa ahli dengan pemikiran Ibn Khaldun. Buku ini memaparkan definisi secara umum tanpa menampilkan literatur kajian Islam tentang bagaimana kekuasaan itu berkembang dalam kehidupan umat manusia.

Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern: Teori, Fakta, Dan Aksi Sosial*, yang membahas pemikiran Ibn Khaldun secara mendasar serta menobatkannya sebagai bapak sosiologi dalam Islam. Buku ini memperkaya rujukan *Muqaddimah* sebagai karya terbesar Ibnu Khaldun.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah penting dalam setiap penelitian. Dengan adanya metode yang telah ditentukan dapat memudahkan dan memberi arah kepada peneliti dalam kegiatan penelitian. Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.²⁴ Untuk mencapai hasil penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan agar penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai prosedur keilmuan, maka metodologi merupakan kebutuhan yang sangat urgen dan sangat membantu penulis dalam memahami hasil-hasil penelitian secara objektif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini bersifat kepustakaan (*library research*) yaitu suatu jenis penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis dalam pengumpulan datanya, seperti buku, jurnal, majalah, buletin, surat kabar, serta karangan-karangan lainnya yang bersifat ilmiah baik yang dipublikasikan maupun yang menjadi dokumen khusus.²⁵

Dalam proses pemaparan hasil bacaan penulis menggunakan dua jenis kutipan yakni kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil dari bahan rujukan dengan tanpa mengubah dan mengurangi atau melebih-lebihkan isi kutipan tersebut. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang diambil dari bahan rujukan dengan menggunakan bahasa penulis tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang terkandung dari tulisan tersebut.

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1998), h. 61.

²⁵A. Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar, Indobis Media Centre, 2003), h 106.

Setelah data terkumpul, selanjutnya disusun secara sistematis dan diolah secara kualitatif yang diinterpretasikan dan dianalisis dalam konsep pemikiran terhadap objek permasalahan yang dibahas.²⁶ Dengan demikian data yang dihasilkan adalah data yang bersifat deskriptif.

2. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Sumber data primer, merupakan sumber data utama yang berasal dari informasi yang diperoleh dari buku-buku induk yang berisi tentang informasi dan hal-hal yang berkaitan langsung dengan pemikiran politik Ibnu Khaldun tentang kekuasaan dan legitimasi politik. Buku-buku referensi, yaitu buku-buku yang memuat informasi spesifik dan paling umum serta paling sering dirujuk untuk keperluan yang cepat.²⁷ Beberapa diantaranya, Al-Qur'an, *muqaddimah*, Dasar-Dasar Politik, Pemikiran Politik Islam, dan lain sebagainya.
- Sumber data sekunder, yaitu data pendukung yang melengkapi data primer seperti majalah, artikel, jurnal, atau *website* yang berkaitan dengan penelitian, atau buku pembandingan yang bisa mendukung pemikiran politik Ibnu Khaldun tentang kekuasaan dan legitimasi politik. Sumber sekunder di rujuk sebagai tambahan untuk memperkaya sumber primer, diantaranya adalah beberapa artikel atau majalah atau jurnal ilmiah yang memuat

²⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Cet. Xiv; Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2003), h 73.

²⁷Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.10

informasi yang berkaitan dengan definisi ataupun hal-hal umum yang berkaitan tentang kekuasaan dan legitimasi politik Islam perspektif Ibnu Khaldun.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan berbagai referensi dan tautan yang berkaitan dengan pemikiran politik Ibnu Khaldun tentang kekuasaan dan legitimasi politik dengan membaca buku-buku atau sumber-sumber yang lain yang menjadi rujukan berkaitan dengan kekuasaan dan legitimasi politik Islam menurut pemikiran Ibnu Khaldun dan mencatat data-data yang relevan terhadap pembahasan tentang masalah yang akan ditinjau.

4. Analisis Data

Oleh karena data yang dianalisis lebih bersifat kualitatif, maka dalam penelitian ini, setelah data terkumpul data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kongklusi.²⁸ Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah dimulai dari dikumpulkan, dicatat dan diklasifikasikan serta dianalisis untuk mencari kebenaran yang berhubungan dengan kekuasaan dan legitimasi politik menurut pemikiran Ibnu Khaldun, yaitu berupa kutipan secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kekuasaan dan legitimasi politik menurut pemikiran Ibnu Khaldun, lantas yang terakhir adalah disimpulkan. Dari hasil tersebutlah data dijadikan bahan untuk penulisan skripsi ini.

²⁸ Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 7

H. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan ; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Sketsa Tentang Ibnu Khaldun dan Pemikirannya ; Riwayat Hidup, Karya, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun.

Bab III : Kekuasaan Dan Legitimasi Politik ; Pengertian Kekuasaan, Dimensi Kekuasaan, Jenis-Jenis Kekuasaan, Pengertian Legitimasi, Objek Legitimasi, Tipe-Tipe Legitimasi.

Bab IV : Kekuasaan Dan Legitimasi Politik Islam Menurut Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun ; Dasar pemikiran Ibnu Khaldun tentang kekuasaan dan legitimasi politik, kekuasaan politik menurut pemikiran Ibnu Khaldun, legitimasi '*Ashbiyah*' menurut pemikiran Ibnu Khaldun.

Bab V : Penutup ; Kesimpulan dan Saran-Saran.

BAB II

LATAR BELAKANG KEHIDUPAN IBNU KHALDUN

A. Biografi Ibnu Ibnu Khaldun

Nama lengkap Ibnu Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin bin Ibnu Khaldun. Ibnu Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadhan 732 H bertepatan tanggal 27 Mei 1333 M. Nenek moyang Ibnu Ibnu Khaldun berasal dari golongan Arab Yaman di Hadramaut. Baru setelah Islam mengalami kehilangan kekuasaan di Andalusia, seluruh keluarganya pindah ke Tunisia.²⁹ Secara garis besar kehidupan Ibnu Ibnu Khaldun dibagi menjadi empat fase:

1. Pertumbuhan dan studi yang dimulai dari tahun 732 H hingga akhir tahun 751 H. Seperti kebiasaan pada waktu itu, sang ayah adalah guru pertamanya. Setelah itu, ia belajar di luar dengan beberapa guru. Dalam ilmu bahasa, ia belajar dengan Abu Abdillah Muhammad Ibn Al-Arabi dan Abu Abdillah Muhammad Ibnu Bahr. Ilmu fiqh ia pelajari dari Abu Abdillah Al-Jiyani dan Abu Al-Qasim Muhammad Al-Qashir. Selain mempelajari ilmu agama, ia juga belajar ilmu lain seperti ilmu filsafat, teologi, ilmu alam, matematika, dan astronomi.³⁰
2. Keterlibatan dalam dunia politik. Kondisi politik pada masa itu ditandai oleh kemajemukan kerajaan-kerajaan Islam yang menyebabkan dunia politik penuh dengan intrik politik. Ibnu Khaldun tidak mengelak dalam berbagai intrik politik tersebut. Latar belakang pendidikannya telah

²⁹ Ayi Sofyan, *Kapita Selekta Filsafat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 269

³⁰ Zainab, *Perkembangan Pemikiran Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 10

membedakan Ibnu Khaldun dengan tokoh politik kala itu. Disamping terlibat penuh dalam dinamika intrik politik, Ia juga menyempatkan diri sebagai pengamat perilaku-perilaku politik kaum elit.³¹ Karir politik Ibnu Khaldun dimulai sebagai tukang stempel surat dalam pemerintahan Ibnu Tafrakin ditaklukkan Abu Zaid, dalam sebuah intrik dan perebutan kekuasaan, Ibnu Khaldun melarikan diri dan bekerjasama dengan sultan Abu Inan di Tlemcen sebagai sekretaris. Selanjutnya Ibnu Khaldun melibatkan diri ke dalam sebuah intrik politik dimana ia bekerjasama dengan rival Sultan Abu Inan, Amir Abu Abdullah Muhammad, untuk merebut kekuasaan sang sultan. Intrik ini melahirkan malapetaka bagi Ibnu Khaldun. Ia dipenjara Sultan Abu Inan selama dua tahun begitu persekongkolan politik dan kekuasaan tersebut ditumpas. Selanjutnya Ibnu Khaldun mengabdikan pada Abu Salim penguasa Maroko. Ibnu Khaldun diangkat sebagai sekretaris dan penasihatnya. Setelah Abu Salim wafat pada tahun 1362, Ibnu Khaldun bergabung dengan pemerintahan Muhammad V dari Granada. Sang raja menjadikannya duta besar. Tugas yang pernah diembannya adalah sebagai utusan Sultan Muhammad V untuk menemui Pedro dari Castilla, Spanyol. Khaldun bahkan dipercaya sebagai wakil penuh sang raja karena ia bertindak sebagai penandatangan perjanjian perdamaian antara kedua Negara. Karena tidak sepaham dengan sebagian pembesar Granada, Ibnu Khaldun menerima tawaran Abdullah Muhammad Al-hafsi sebagai perdanamenteri. Di tengah jalan, intrik dan pergolakan politik yang tidak kenal henti yang melanda

³¹Dr. Ahmad Syafei Ma'rif, *Ibnu Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat Dan Timur*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 12

kerajaan-kerajaan Islam menjadikannya beralih loyaltasnya kepada Abu Abbas, sepupu Muhammad Al-Hafsi, yang merebut kekuasaan.

3. Ibnu Ibnu Khaldun mengembangkan pemikiran dan kontemplasi yang berlangsung dari tahun 776 H sampai akhir tahun 780 H. Ini dilakukan setelah fase pengabdianya kepada kekuasaan dalam berbagai pemerintahan. Nampaknya Ibnu Ibnu Khaldun merasa lelah dalam petualangan politiknya dan memutuskan untuk hidup menyendiri guna menyusun karya-karyanya di benteng Banu Salamah. Dalam masa kontemplasi yang relatif singkat inilah Ibnu Khaldun berhasil menyelesaikan salah satu karya monumentalnya, *Al-Ibar* beserta *Muqaddimah*.
4. Babak akhir kehidupannya. Ibnu Khaldun mulai mengundurkan diri dari dunia politik. Ibnu Khaldun dengan serius membenamkan diri pada tugas intelektualnya, menyelesaikan karya monumental yang dianggap masih tersisa. Seluruh karya yang dihasilkan diberikan kepada penguasa. Intrik politik tidak selesai melandanya. Ia menjadi sasaran tembak para elit dalam lingkaran kekuasaan. Pembesar negeri tersebut telah merusak persahabatannya dengan sultan Abu Al-Abbas. Kenyataan inilah yang mendorongnya meninggalkan wilayah kekuasaan itu. Ibnu Khaldun membuat kamufase dengan meminta izin kepada sultan untuk pergi haji. Dalam kenyataannya, Ibnu Ibnu Khaldun tidak mengarahkan kakinya ke Makkah. Ia ke Iskandaria. Ibnu Ibnu Khaldun diterima Sultan Al-Malik Al-Zahir Barquq. Sultan mengagumi pemikiran Ibnu Khaldun dan menjadikannya sebagai hakim agung

Ibnu Khaldun bertemu Timur Lenk sang penakluk dan penguasa baru yang sangat terkenal dalam sejarah kekuasaan dan peradaban Islam di Timur Tengah di Syiria. Seperti sultan lainnya, Timur Lenk mengagumi pemikiran Ibnu Khaldun hingga ia menawari Ibnu Khaldun untuk bekerja di istananya. Tampaknya fase kontemplasi Ibnu Khaldun tidak menyisakan nafsu politik dan kekuasaan lagi. Akhirnya Ibnu Khaldun menolak tawaran yang menggiurkan itu. Ibnu Ibnu Khaldun pada akhirnya tak lagi menghiraukan godaan-godaan kekuasaan di akhir fase kehidupannya. Bahkan ia tak lagi bergeming untuk memberikan reaksi terhadap pancingan lawan-lawan politiknya. Ibnu Khaldun tetap menjadi ilmuwan dan hakim agung sampai akhir hayat.

B. Karya Ibnu Ibnu Khaldun

Sebenarnya Ibnu Ibnu Khaldun telah menghasilkan berbagai banyak karya, namun banyak dari karya-karya tersebut yang belum ditemukan ataupun yang tidak diterbitkan sama sekali. Walaupun Ibnu Ibnu Khaldun hidup saat dimana kejayaan akan islam mengalami kehancuran, akan tetapi beliau dapat unjuk diri sebagai cendikiawan muslim yang hebat dan memberikan pemikiran yang maju besar didalam karya beliau yang diantaranya adalah *Burdha Albuhairi*, *Muhashal Fi Ushul Ad-Din*, dan *Syifa As Sailfitahdzib Al-Masatt*. Karya-karya Ibnu Ibnu Khaldun yang banyak di bahas para ahli sampai saat ini adalah *Al I'bar*, *Muqaddimah*, dan *Al Ta'rif*. Sebenarnya kitab *Muqaddimah* dan *Al Ta'rif*, merupakan bagian dari kitab *Al Ibar* didalamnya memiliki tujuh jilid. *Muqaddimah* merupakan bagian pembukaanya. Adapun penjelasan mengenai kitab *Al I'bar* yang terdiri dari tujuh jilid besar tersebut ialah sebagai berikut :

1. Jilid pertama disebut dengan kitab *Muqaddimah*

Muqaddimah ialah bagian pertama dari kitab *Al I'bar* yang membahas tentang masyarakat dan gejalanya, seperti : pemerintahan, penghidupan, perdagangan, keahlian, ilmu-ilmu pengetahuan, serta alasan-alasan untuk memilikinya. Kitab pengantar yang panjang inilah yang merupakan inti dari seluruh persoalan yang terdapat dalam kitab *Al Ibar*, sehingga karya ini dikenal sebagai karya yang monumental dari Ibnu Ibnu Khaldun .

Walaupun *muqaddimah* adalah bagian dari *Al I'bar*, tetapi kitab *muqaddimah* ini dibedakan dari karya induknya yaitu *Al I'bar* dan akan dibahas sendiri.³² *Muqaddimah* merupakan kejayaan yang tidak terduga dalam warisan intelektual sastra arab karna pemikiran dan penelitiannya sangat luar biasa serta memuat berbagai metode dari gejala-gejala sosial dan sejarahnya, memuat berbagai aspek kehidupan dan juga ilmu pengetahuan.

Hal tersebut membuat pemikiran Ibnu Ibnu Khaldun tetap di bicarakan hingga saat ini sebagai mana pemikir-pemikir besar lainnya sepanjang masa. Ibnu Ibnu Khaldun menyelesaikan penulisan kitab *muqaddimah* yang mengagumkan tersebut hanya dalam waktu lima bulan di benteng salamah pada pertengahan 779 H/ 1377 M, untuk kemudian direvisi dan memelitur sampulnya, serta melengkapinya dengan berbagai sejarah bangsa-bangsa. Kitab ini menjadi kajian dan teori yang canggih yang menempati posisi tinggi di antara hasil-hasil pemikiran manusia, juga menjadi legenda Bahasa Arab.³³

³² Al-Alamah, Abdurrahman Bin Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Terj. Masturi Dirham, Dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h.1085

³³ Enan, Abdulah, Muhammad, *Biografi Ibnu Khaldun* Terj. Mchnun Husein, (Jakarta : Zaman, 2013), h. 70

Pada abad ke-15 ketika histografi Eropa masih begitu tebelakang dan tidak mengenal konsep-konsep karakter yang dikemukakan dan dipertahankan Ibnu Khaldun , belum ada muncul sebuah buku pun yang ditulis seperti *muqaddimah*, yang membahas semua masalah dan dikemukakan secara lebih mandiri, untuk membentuk pandangan dasar pada para sejarawan modern. Para kritikus barat menempatkan kitab *muqaddimah* di antara hasil-hasil pemikiran manusia yang paling tinggi.³⁴

Pokok-pokok pembahan di dalam kitab *muqaddimah* dibagi menjadi enam bab. Bab tersebut adalah sebagai berikut.³⁵

- a. Bab *pertama* membahas peradaban dan kebudayaan umat manusia secara umum. Bab ini meliputi enam pengantar yang berisikan pentingnya organisasi sosial kemsyarakatan, pengaruh iklim dan letak geografis terhadap warna kulit, letak dan sistem kehidupan. Didalamnya juga membahas tentang wahyu, mimpi, kesanggupan manusia mangetahui yang gaib secara alami ataupun melalui latihan khusus.
- b. Bab *kedua* membahas tentang kebudayaan Badui dan suku-suku yang lebih beradap, peradaban masyarakat pengembara, bangsa dan kabilah-kabilah liar, serta kehidupan mereka. Bagian ini terdiri dari 29 pasal. Sepuluh pasal pertama berisikan bangsa-bangsa pengembara dan pertumbuhan mereka, keadaan masyarakat, dan asal-usul kemjuan. Selain itu dibahas pula mengenai prinsip-prinsip umum pengendali masyarakat dalam nuansa sosiologi filsafat sejarah. Adapun sembilan

³⁴*Ibid*, h. 194

³⁵ Syaifuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun*, (jakarta : Gama Media, 2007), h. 39-41

belas pasal berikutnya memeparkan susunan pemerintahan, hukum, politik, dan hal-hal yang terdapat di kalangan bangsa-bangsa tersebut.

- c. Bab *ketiga* membahas tentang negara, kerajaan, khalifah, tingkatan, kekuasaan, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan menekankan filsafat sejarah untuk mengetahui sebab-sebab munculnya kekuasaan dan sebab-sebab runtuhnya suatu negara. Dalam bab ini dibahas secara luas mengenai negara, kadaulatan, persoalan politik dan sistem pemerintahannya.
- d. Bab *keempat* membahas berbagai hal tentang wilayah-wilayah pedesaan dan perkotaan, kondisi yang ada, berbagai peristiwa yang terjadi dan hal-hal utama yang harus diperhatikan.
- e. Bab *kelima* membahas berbagai hal tentang isi perekonomian negara, mata pencaharian, ekonomi, perdagangan dan industri. Dalam beberapa pasal didalamnya juga diterangkan tentang beragam ilmu pengetahuan, seperti pertanian, pembangunan, pertentangan, kebidanan, dan pengobatan.
- f. Bab *keenam* membahas berbagai jenis ilmu pengetahuan, pengajaran dan metode-metodenya, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah tersebut dalam tradisi Arab. Selanjutnya bab ini di akhiri dengan sastra Arab.

Dari bagian-bagian bab diatas, terlihat jelas betapa luas dan beragamnya bidang kajian yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya *Muqaddimah* yang ditunjukkan untuk mengkritik sejarah dalam

upaya menemukan hukum-hukum sejarah dalam upaya menemukan hukum-hukum sejarah yang terkait dengan kehidupan sosial politik.

2. Jilid ke-2 hingga ke-5 disebut dengan kitab *Al I'bar*

Al I'bar merupakan karya utama Ibnu Khaldun, adapun judul asli dari kitab *Al I'bar* ini yaitu, kitab *Al I'bar Wa Diwan Al Mubtada' Wa Al Khabbar Fi Ayyam Al 'Arab Wa Al Ajam Wa Al Barbar Wa Man Asharuhum Min Dzawi As Shulthani Al Akbar* (Kitab Perjalanan Dan Arsip Sejarah Zaman Pemulaan Dan Zaman Akhir Yang Mencakup Peristiwa Politik Mengenai Orang Orang Arab, Non Arab Dan Barbar, Serta Raja Besar Yang Semasa Dengan Mereka).³⁶ Karena judul kitab tersebut terlalu panjang sehingga dalam berbagai referensi pada umumnya sering disebut dengan kitab *Al I'bar* atau *Tariqh Ibnu Ibnu Khaldun*.

Kitab *Al I'bar* di selesaikan Ibnu Ibnu Khaldun ketika bermukim di *Qal'ah Ibn Salamah*, daerah Al-jazair sekarang, beliau memulai hidup baru ditengah kesunyian padang pasir dengan menghabiskan waktu ditempat tersebut selama empat tahun (776-780 H) dan berkonsentrasi dalam menulis *Al I'bar* sebagai suatu karya sosio-historis yang terkenal.³⁷

Kitab kedua yang terdiri dari empat jilid ini menguraikan tentang sejarah bangsa arab dari generasi-generasi dan dinasti-dinastinya sejak kelahiran Ibnu Khaldun. Disamping itu juga berisi tentang sejarah berapa bangsa yang terkenal pada saat itu dan orang-orang besar beserta dinasti-dinastinya, antara lain Pontian, Turki, Persia, Romawi, Koptik, Yunani, Yahudi dan Syria hingga abad ke-8 H/ke-14 M

³⁶ Ibnu khaldun, *muqaddimah*, h. 1085

³⁷ Syaifuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun*, h. 35

Kitab ketiga yang terdiri dari dua jilid ini berisi tentang sejarah bangsa barbar dan suku-suku yang termasuk didalamnya, seperti suku Zanata, Nawatah, Masmudah, Baranis, serta asal-usul dan generasinya. Selanjutnya Ibnu Khaldun pun membahas tentang sejarah dinasti yang ada pada masanya, seperti Dinasti Bani Hafsh, Dinasti Bani ‘Abdul Wadd’ dan Dinasti Bani Warin (Mariyin). Pembahasan terakhir dari kitab ini adalah tentang Ibnu Khaldun yang berbicara tentang dirinya sendiri. Beliau menyelesaikan penulisan kitab ini pada awal tahun 797 H.

Dan karya Ibnu Khaldun yang ada ialah:

1. *Burdha Albuhairi*, karya ini berbicara tentang logika dan aritmatika.
2. *Muhashal Fi Ushul Ad-Din*, karya ini berbicara tentang teologi skolastik.
3. *Syifa As Sailfitahdzib Al-Masatt*, karya ini berbicara tentang sufisme konvensional.

C. Pemikiran Politik Ibnu Khaldun

Perkembangan konsep maupun teori yang dikembangkan seorang intelektual tentu tidak terlepas dari kondisi sosial maupun politik yang mengharuskan dirinya merespon, menganalisis, kemudian memberikan solusi untuk memberi solusi terhadap persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, solusi yang diberikan akan membunikan dan banyak memberi manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Persoalan yang dihadapi langsung direspon dengan mengedepankan metode yang aktual dan relevan dengan konteks yang dihadapi. Selain itu, dalam konteks ilmuwan, penyelesaian semacam ini bisa membantu perkembangan teori baru. Tentu saja, ini akan memberi manfaat besar bagi kelangsungan masyarakat luas.

Ibnu Ibnu Khaldun barangkali merupakan salah satu intelektual yang biasa dikatakan demikian. Berangkat dari kontak dan hubungan secara langsung terhadap berbagai kondisi dan perkembangan politik yang ditemui diberbagai tempat, serta analisisnya terhadap sejarah sebelumnya, ditambah lagi pengamatannya yang menggunakan pendekatan sosiologis, memberikan kontribusi baru bagi perkembangan keilmuan saat itu, dan membuka cakrawala baru bagi perkembangan keilmuan selanjutnya. Karenanya, maka tidak salah apabila bnyak kalangan intelektual maupun akademisi menempatkanya sebagai ilmuwan modern.³⁸

Adapun pemikiran Ibnu Ibnu Khaldun di antaranya adalah:

a. Negara

Ibnu Ibnu Khaldun memulai pembicaraan mengenai negara berdasarkan pada kenyataan bahwa manusia adalah mahluk yang hidup berkelompok dan saling memerlukan bantuan. Hal ini dilakukan manusia untuk bisa bertahan hidup dan untuk mendapatkan rasa aman. Oleh karenanya diperlukan kerja sama antara sesama manusia. Kerja sama tersebut membentuk suatu organisasi kemasyarakatan. Dari sinilah Ibnu Ibnu Khaldun mengatakan bahwa organisasi kemasyarakatan adalah merupakan keharusan. Karenanya, peradaban umat manusia itu tidak lepas dari organisasi masyarakat tersebut.³⁹

Seperti yang dikemukakan di atas, Ibnu Ibnu Khaldun berpandangan bahwa adanya organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup masyarakat, karena sesungguhnya manusia memiliki watak hidup bermasyarakat.

³⁸ Berkat pengamatannya terhadap sejarah tersebut Ibnu Khaldun sering diberi gelar bapak historiografi . lihat Cyril Glasse, *Enseklopedia Islam*, Terj. Gufron A. Mas'adi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h.148

³⁹Hakimul Ikhwan Afandi, *Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),h.89

Tatanan sosial akan berubah dalam suatu masyarakat, sehingga masyarakat yang lain senantiasa kemudian mengikuti faktor-faktor yang dimiliki oleh masyarakat pertama, yaitu menyangkut iklim, cuaca, tanah, makanan, sumber tambang, kemampuan berfikir, jiwa dan emosi mereka.⁴⁰

Setelah organisasi kemasyarakatan terbentuk dan beradaban merupakan suatu kenyataan di dunia ini, maka masyarakat membutuhkan seseorang dengan pengaruhnya dapat bertindak sebagai penengah dan pemisah antara anggota masyarakat.⁴¹ Menurutnya, peran sebagai penengah dan pemisah hanya dapat dilakukan oleh seorang dari anggota masyarakat itu sendiri. Seseorang tersebut harus berpengaruh kuat atas anggota-anggota masyarakat, harus mempunyai kekuasaan dan otoritas atas mereka sehingga tidak seorangpun di antara anggota masyarakat dapat mengganggu atau menyerang sesama anggota masyarakat yang lain. Tokoh yang mempunyai kekuasaan, otoritas dan wibawa tersebut adalah raja, khalifah atau kepala negara.⁴²

b. Kekuasaan

Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun sebenarnya terbentuk melalui kemenangan suatu kelompok tertentu atas lainnya. Kekuasaan itu merupakan kedudukan yang menyenangkan, meliputi berbagai kesenangan materi maupun maknawi, material maupun spiritual, *visible* maupun *invisible* untuk mendapatkannya seringkali melalui kompetisi-kompetisi menggemparkan dan

⁴⁰Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990),h.99

⁴¹*Ibid*,h.92

⁴²*ibid* h.99

sedikit orang yang mau menyerahkannya.⁴³ Selanjutnya, Ibnu Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa pemimpin sebagai pemilik kekuasaan berperan sebagai penanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan kesatuan sosial, dan mencegah dari hal-hal yang dapat merusak. Untuk itu pemimpin dibutuhkan sebagai pengganti nabi menyeru kepada kewajiban islam dan menegakkannya bersama-sama.⁴⁴

Kompetisi kekuatan antarkelompok biasanya tidak dapat dilepaskan dari sikap-sikap arogan untuk memperoleh kekuasaan tersebut, dimana pemegang kebijaksanaan dan perseorangan atau kelompok yang berkuasa senantiasa mencari legitimasi kemenangan dari masa dengan berbagai macam manuver siasat atas kelompok, profesi, bahkan agama.

⁴³Al-Allamah Abdurrahman Bin Muhammad Bin Kahaldun, *Muqaddimah*, Terj. Masturi Irham, h. Vii

⁴⁴Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Kerucut Kekuasaan Pada Zaman Awal Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016), h. 93

BAB III

KEKUASAAN DAN LEGITIMASI POLITIK

A. Konsep Kekuasaan Politik

1. Pengertian kekuasaan

Secara etimologi kekuasaan berasal dari bahasa Inggris yang berarti *power* yang memiliki makna kemampuan berbuat dan bertindak. Menurut Dahl *power* identik dengan *influence*, *authority*, and *rule*.⁴⁵ Dalam perbendaharaan ilmu politik terdapat jumlah konsep yang berkaitan erat dengan konsep kekuasaan (*power*), seperti *influence* (pengaruh), persuasi (*persuasion*), manipulasi, *coercion*, *force*, *authority* (kewenangan).⁴⁶ Secara umum kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi.

Pengertian kekuasaan sangat beraneka ragam. Beberapa tokoh mendefinisikan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.⁴⁷ Definisi yang lain menyebutkan kekuasaan ialah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak-pihak lain⁴⁸

⁴⁵M Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.[Lembar Transliterasi]

⁴⁶Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1992), h.71

⁴⁷Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h.35

⁴⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.228

Kekuasaan adalah konsep yang berhubungan erat dengan masalah pengaruh, persuasi, manipulasi, koersi, kekuatan, dan kewenangan. Kekuasaan juga bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sehingga menyebabkan orang lain bertindak sesuai dengan keinginan orang yang memiliki kekuasaan itu.⁴⁹ Menurut sumbernya, Wirawan, mencatat beberapa sumber kekuasaan, yaitu : posisi, sifat, personal, keahlian, dan peluang untuk mengontrol informasi.⁵⁰

Kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini.⁵¹ Definisi yang lain, Abraham Kaplan mengemukakan kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok yang lain ke arah tujuan dari pihak pertama.⁵² Dengan demikian, kekuasaan merupakan “cara” yang digunakan oleh para pemilik jabatan melakukan kewenangan untuk memaksakan kehendak pada masyarakatnya.⁵³

2. Dimensi kekuasaan

Untuk memahami gejala politik kekuasaan secara tuntas maka kekuasaan ditinjau dari enam dimensi, yaitu potensial dan aktual, positif dan negatif,

⁴⁹Eman hermawan. *Politik Membela Yang Benar : Teori, Kritik, Dan Nalar*, (yogyakarta: DKN Garda Bangsa, 2001) h.5

⁵⁰Eman Hermawan, *politik membela yang benar*, h.237

⁵¹Definisi ini oleh Max Weber dalam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h.60

⁵²*Ibid*, h.60

⁵³Bertolak belakang pada definisi diatas Ibnu Khaldun mengemukakan kekuasaan itu merupakan kedudukan yang menyenangkan yang diperoleh melalui kemenangan suatu kelompok tertentu atas lainnya. Pemimpin sebagai pemilik kekuasaan berperan sebagai penanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan kesatuan sosial, dan mencegah dari hal-hal yang dapat merusa. Untuk itu pemimpin di butuhkan sebagai pengganti nabi menyeru kepada kewajiban islam dan menegakkannya bersama-sama. Baca : Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Irham, Dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. vii

konsensus dan paksaan, jabatan dan pribadi, implisit dan eksplisit, langsung dan tidak langsung.⁵⁴

a) Potensial dan aktual

Seseorang dipandang mempunyai kekuasaan potensial apabila dia memiliki sumber-sumber kekuasaan, seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan dan informasi, popularitas, status sosial yang tinggi, massa yang terorganisasi, dan jabatan. Sebaliknya, seseorang dipandang memiliki kekuasaan aktual apabila dia telah menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya ke dalam kegiatan politik secara efektif (mencapai tujuannya). Seorang jutawan mempunyai kekuasaan potensial, tetapi dia hanya dapat disebut sebagai memiliki kekuasaan aktual apabila dia telah menggunakan kekayaannya untuk mempengaruhi para pembuat dan pelaksana keputusan politik secara efektif. Secara potensial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dipandang memiliki kekuasaan yang sangat besar, baik dari senjata yang mereka miliki dan “jasa” mereka dalam membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan dan menumpas komunis maupun dari jabatan yang mereka pegang dalam pemerintahan. Namun, yang digunakan secara aktual oleh ABRI mungkin sebagian saja karena berbagai faktor, seperti ideologi, hukum dan moral, sedangkan yang tidak digunakan tetap bersifat potensial.

b) Konsensus dan paksaan

Dalam menganalisa hubungan kekuasaan maka seseorang harus membedakan kekuasaan yang berdasarkan paksaan dengan kekuasaan yang

⁵⁴Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, h.59-64

berdasarkan konsensus. Penganalisis politik yang menekankan aspek paksaan dari kekuasaan akan cenderung memandang politik sebagai perjuangan, perentangan, dominasi, dan konflik. Mereka melihat tujuan yang ingin di capai oleh elit politik tidak menyangkut masyarakat secara keseluruhan, melainkan menyangkut kepentingan kelompok kecil masyarakat. Sebaliknya, penganalisa politik yang menekankan aspek konsensus dari kekuasaan akan kecenderungan melihat elit politik sebagai orang yang tengah berusaha menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan masyarakat secara keseluruhan.

c) Positif dan negatif

Tujuan umum pemegang kekuasaan untuk mendapatkan ketaatan atau penyesuaian diri dari pihak yang dipengaruhi. Tujuan umum ini di kelompokkan menjadi dua aspek yang berbeda, yaitu tujuan positif dan negatif. Yang di maksud dengan kekuasaan positif ialah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan, sedangkan kekuasaan negatif ialah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain mencapai tujuannya yang tidak hanya di pandang tidak perlu, tetapi juga merugikan pihaknya.

Untuk menentukan mana yang positif dan negatif di perlukan tolak ukur yang jelas dan disepakati bersama, seperti sistem nilai bangsa negara yang bersangkutan. Dengan demikian seseorang elit politik mencapai tujuan positif atau negatif sering kali di tentukan dengan posisinya dalam hirarki kekuasaan.

d) Jabatan dan pribadi

Dalam masyarakat yang sudah maju dan mapan, kekuasaan terkandung erat dalam jabatan-jabatan, seperti presiden, perdana menteri, menteri-menteri, dan

senator. Contoh, tanpa memandang kualitas pribadinya seorang presiden di Amerika Serikat akan memiliki kekuasaan formal yang besar. Namun, penggunaan kekuasaan yang terkandung dalam jabatan itu secara efektif bergantung sekali pada kualitas pribadi yang dimiliki dan ditampilkan oleh setiap pribadi yang memegang jabatan.

Oleh karena itu, pada masyarakat maju dan mapan baik jabatan maupun kualitas pribadi yang menduduki jabatan merupakan sumber kekuasaan. Sebaliknya, pada masyarakat yang sederhana, struktur masyarakat kekuasaan yang didasarkan atas kualitas pribadi tampak lebih menonjol dari pada kekuasaan yang terkandung dalam jabatan. Dalam hal ini, pemimpin melaksanakan kekuasaan khususnya terhadap orang dari pada terhadap lembaga-lembaga. Efektifitas kekuasaannya terutama berasal dari kualitas pribadi, seperti kharisma, penampilan diri, asal-usul keluarga, dan wahyu.

e) Implisit dan eksplisit

Kekuasaan implisit ialah pengaruh yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan, sedangkan kekuasaan eksplisit ialah pengaruh yang secara jelas terlihat dan terasakan. Adanya kekuasaan implisit ini menimbulkan perhatian orang pada segi rumit hubungan kekuasaan yang disebut "asas memperkirakan reaksi pihak lain". Sedangkan kekuasaan eksplisit biasanya para pemimpin politik memperkirakan sungguh-sungguh kemungkinan reaksi atau kekuasaan eksplisit pihak-pihak lain sebelum melakukan tindakan politik.

f) Langsung dan tidak langsung

Kekuasaan langsung ialah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana politik dengan melakukan hubungan secara

langsung tanpa melalui perantara. Sedangkan kekuasaan tidak langsung ialah penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui perantara pihak lain yang diperkirakan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan politik.

3. Jenis –jenis Kekuasaan

Ada beberapa jenis-jenis kekuasaan, yaitu monarki dan tirani, aristokrasi dan oligarki, demokrasi dan mobokrasi.

a. Monarki dan tirani

Monarki berasal dari kata '*monarch*' yang berarti raja, yaitu jenis kekuasaan politik dimana raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan dominan negara (kerajaan). Para pendukung monarki biasanya mengajukan pendapat bahwa jenis kekuasaan yang dipegang oleh satu tangan ini lebih efektif untuk menciptakan suatu stabilitas di dalam proses pembuatan kebijakan. Perdebatan dan perbedaan pendapat, atau persaingan antar kelompok menjadi relatif berkurang karena hanya ada satu kekuasaan yang dominan.

Negara-negara yang menerapkan jenis kekuasaan monarki hingga saat ini adalah Inggris, Swedia, Denmark, Belanda, Norwegia, Belgia, Luxemburg, Jepang, Muangthai dan Spanyol. Di negara-negara tersebut, monarki menjadi alat pemersatu yang cukup efektif, misalnya sebagai simbol persatuan antar berbagai kelompok yang ada di tengah masyarakat. Kita perhatikan negara yang modern dan maju seperti Inggris dan Jepang pun masih menerapkan sistem monarki.

Namun di negara-negara tersebut, penguasa monarki harus berbagi kekuasaan dengan pihak lain, terutama parlemen. Proses berbagai kekuasaan

tersebut dikukuhkan lewat konstitusi (undang-undang dasar). Oleh karena itu, monarki di era negara-negara modern sesungguhnya bukan lagi absolut melainkan bersifat monarki kontitusional. Bahkan, kekuasaan hanya bersifat simbolik (sekedar kepala negara). Dalam suatu negara monarki, pihak yang relatif lebih berkuasa untuk menentuka jalannya pemerintah adalah parlemen dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahanya.

Jenis monarki lainya yang kini masih adalah Arab Saudi. Negara ini berupa kerajaan dan raja adalah sekaligus kepala negara dan pemerintahan. Kekuasaan raja tidak dibatasi secara konstitusional, tidak ada partai politik dan oposisi disana. Pola kekuasaan Arab Saudi juga dikenal sebagai dinasti, dimana pewaris raja adalah keturunanya.

Didalam suatu negara monarki, tidak selamanya berjalan dengan mulus. Bentuk pemerintahan yang buruk didalam negara monarki disebut Tirani. Tiran-tiran kejam yang pernah muncul dalam sejarah politik dunia, misalnya kaisar Nero, Caligula, Hitler atau Stalin. Meskipun Hitler atau Stalin memerintah di era negara modern, tetapi jenis kekuasaan yang mereka jalankan pada hakekatnya terkonsentrasai pada satu tangan. Keduanya sama sekali tidak mau membagi kekuasaan dengan pihak lain dan kerap kali bersifat kejam baik terhadap rakyat sendiri maupun lawan politik.

b. Aristokarasi dan Oligarki

Aristokrasi merupakan pemerintahan oleh sekelompok elit masyarakat. Mereka ini mempunyai status sosial, kekayaan, dan kekuasaan politik yang besar. Ketiga hal ini dinikmati secara turun-temurun (diwariskan), menurun dari orang

tua kepada anak. Jenis kekuasaan aristokrasi ini disebut pula sebagai jenis kekuasaan kaum bangsawan (Aristokrasi).

Biasanya, ada kelas aristokrasi yang dominan secara politik, maka disana ada pula monarki. Namun, jenis kekuasaan oleh beberapa orang ini (aristokrasi) tidak bertahan lama sebab orang-orang yang orang tuanya yang bukan bangsawan pun bisa duduk memengaruhi keputusan politik negara asalkan mereka berprestasi, kaya, berpengaruh, dan cerdas. Jika kenyataan ini terjadi, yaitu peralihan dari kekuasaan para bangsawan kekelompok non-bangsawan, hal tersebut dinyatakan sebagai peralihan atau pergeseran dari aristokrasi menuju oligarki. Untuk menggambarkan peralihan tersebut, baiklah kami kemukakan apa yang terjadi di Inggris. Sebelum terjadinya revolusi industri pada abad ke-18, Inggris menganut jenis kekuasaan monarki dengan kaum bangsawan (aristokrat) sebagai pemberi pengaruh yang besar.

Namun, setelah revolusi industri mulai menunjukkan efek, yaitu berupa munculnya kelas menengah baru (pengusaha baru yang kekayaan diperoleh sendiri bukan diwariskan), maka kekuasaan kaum bangsawan dalam mempengaruhi kekuasaan monarki mulai 'digerogoti'. Kelas menengah baru ini mulai menentukan jalannya kekuasaan di parlemen, dan pengaruh kaum 'orang kaya baru' ini dinyatakan sebagai jenis kekuasaan oligarki.

Hingga saat ini di parlemen Inggris terdapat dua kamar, yaitu *house of lords* dan *house of commons*. Kamar pertama berisikan kaum bangsawan (namanya didahului dengan Sir), sedangkan kamar yang kedua banyak diisi oleh kaum kaya yang berpengaruh, meskipun mereka bukan berdarah bangsawan.

House of commons lebih menentukan jalannya parlemen Inggris dari pada *hous of lords*. Dengan demikian, oligarkilah yang lebih berkuasa di Inggris ketimbang aristokrasi pada masa kini.

c. Demokrasi dan Mobokrasi

Jika kekuasaan di pegang oleh seluruh rakyat, bukan oleh seseorang atau beberapa orang, kekuasaan tersebut dinamakan demokrasi. Didalam sejarah politik, jenis kekuasaan demokrasi yang dikenal terdiri atas dua katagori. Katagori pertama adalah demokrasi langsung (*direct democracy*) dan katagori yang kedua adalah demokrasi perwakilan (*respresentative democracy*).

Demokrasi langsung berarti rakyat memerintah dirinya secara langsung, tanpa perantara. Ada empat kondisi yang memungkinkan bagi dilaksankanya demokrasi langsung, yaitu :

1. Jumlah warga negar harus kecil;
2. Pemilikan dan kemakmuran harus dibagi secar merata (hampir merata);
3. Masyarakat harus homogen (sama) secarabudaya;
4. Terpenuhi didalam masyarakat kecil yang bermata pencaharian pertanian.

Didalam demokrasi langsung, memang kedaulatan rakyat lebih tepelihara sebab kekuasaanya tidak diwakilkan. Semua warga negara iut terlibat didalam proses pengambilan keputusan, tanpa tidak ada yang tidak ikut serta. Namun, di zaman pelaksanaan demokrasi langsung sendiri, yaitu dimasa negara-kota Yunani Kuno. Ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak diizinkan untuk ikut serta didalam proses demokrasi langsung, yaitu budak, perempuan, dan orang asing.

Dengan alasan kelemahan demokrasi langsung, terutama oleh ketidakrealistisannya untuk diberlakukan dalam keadaan negara modern, maka demokrasi yang saat ini dikembangkan adalah demokrasi perwakilan. Didalam demokrasi perwakilan, tetap rakyat yang memerintah. Namun, itu bukan berarti seluruh rakyat berbondong-bondong datang ke parlemen atau istana negara untuk memerintah atau membuat UU (undang-undang). Tentu tidak demikian.

Rakyat terlibat secara 'total' didalam mekanisme pemilihan pejabat (utamanya anggota parlemen) lewat pemilihan umum (misal :4 atau 5 tahun sekali). Dengan memilih si anggota parlemen, rakyat tetap berkuasa untuk membuat undang-undang, tetapi keterlibatan tersebut melalui si wakil. Wakil ini adalah orang yang mendapat delegasi wewenang dari rakyat. Di Indonesia satu orang wakil rakyat (anggota parlemen) kira-kira mewakili 300.000 orang pemilih.

Dengan demokrasi perwakilan, rakyat tidak terlibat secara penuh didalam membuat undang-undang negara. Misalnya saja, dari lebih dari 200 juta jiwa warga negara Indonesia, proses pemerintahan demokrasi ditingkat parlemen hanya dilakukan oleh 500 orang wakil rakyat yang duduk menjadi anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Bandingkan kalau saja Indonesia menerapkan demokrasi langsung yang lebih dari 200 juta rakyat Indonesia yang duduk di parlemen. Pasti kacau dan memakan banyak biaya. Dengan demikian demokrasi perwakilan lebih praktis ketimbang demokrasi langsung.

Dalam demokrasi, baik langsung maupun tidak langsung, keterlibatan rakyat menjadi tujuan utama penyelenggaraan negara. Masing-masing individu rakyat pasti ingin kepentinganyalah yang terlebih dahulu dipenuhi. oleh sebab

keinginan tersebut ingin didahulukan dan pihak lain pun sama. Jika hal ini berujung pada situasi (kacau) *chaos* bahkan perang (*bellum omnium contra omnes* – perang semua lawan semua), bukan demokrasi lagi namanya melainkan mobokrasi. Mobokrasi adalah bentuk buruk dari demokrasi, dimana rakyat memang berduka tetapi negara berjalan dalam situasi perang dan tidak satupun kesepakatan dapat dibuat secara damai.

B. Konsep Legitimasi Politik

1. Pengertian Legitimasi

Pembahasan tentang legitimasi dalam teori sosial dan politik tampaknya menegaskan dikemukakan Hegel bahwa refleksi teoritis akan di mulai ketika praktek telah menuntaskan perkembangannya dan menjadi problematis. Peemalahan nilai moral atau kebenaran dari berbagai bentuk aturan yang berbeda telah muncul sejak awal adanya pemikiran sistematis tentang komunitas manusia. Pemikiran tentang legitimasi merupakan sebuah penemuan dalam pemikiran modern, yang terwakili dengan baik pada janji Rousseau dalam *social contract* yang memperlihatkan bagaimana sebuah otoritas politik dapat disebut “absah”.⁵⁵

Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Secara konseptual, legitimasi politik didefinisikan sebagai kepercayaan pada diri orang-orang yang di perintah terhadap hak moral untuk memerintah dan orang-orang yang memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah itu.⁵⁶ Secara

⁵⁵Adam Kuper Dan Jessica Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial Edisi 1-2*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2008), h.562

⁵⁶Syahrul Hidayat, *Mengislamkan Negara Sekuler : Partai Refah, Militer, Dan Politik Elektoral Turki*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.31

etimologi legitimasi berasal dari bahasa latin yaitu *lex* yang berarti hukum. Secara istilah legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan.⁵⁷

Ada beberapa pengertian yang erat kaitanya dengan kekuasaan, yaitu otoritas, wewenang, (*authority*) dan legitimasi (*legitimacy* atau *keabsahan*). Seperti dengan konsep kekuasaan, di sini pun bermacam-macam perumusan ditemukan. Perumusan yang mungkin paling mengenai sasaran adalah definisi yang dikemukakan oleh Robert Bierstedt dalam karangannya *analysis of social power* yang mengatakan bahwa wewenang (*authority*) adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang di lembagakan).⁵⁸

2. Objek legitimasi

Suatu sistem politik dapat lestari apabila sistem politik secara keseluruhan mendapatkan dukungan, seperti penerimaan dan pengakuan masyarakat. Dengan demikian, legitimasi diperlukan bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk unsur-unsur lain dalam sistem politik. Jadi, legitimasi dalam arti luas berarti dukungan masyarakat terhadap sistem politik, sedangkan dalam arti sempit, merupakan dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang.

Menurut Easton, terdapat tiga objek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tidak hanya berlangsung secara terus-menerus, tetapi mampu pula mentransformasikan tuntutan menjadi kebijakan umum. Ketiga objek legitimasi ini meliputi komunitas politik, rezim, dan pemerintahan. Sementara itu Andrain menyebutkan lima objek dalam sistem

⁵⁷Eman Hermawan, *Politik Membela Yang Benar*, h.6

⁵⁸Robert Bierstedt, *An Analysis Of Social Power*, American Sociological Review, Volume 15, (December 1950), h. 732

politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tetap berlangsung dan fungsional. Kelima objek legitimasi ini meliputi masyarakat politik, hukum, lembaga politik, pemimpin politi, dan kebijakan.

Kedua pendapat itu sesungguhnya sama saja maknanya karena masyarakat politik sama dengan komunitas politik, hukum sama dengan rezim, lembaga politik dan pemimpin politik sama dengan pemerintah. Namun berdasarkan pendapat Easton, tidak terkandung unsur kebijakan secara eksplisit. Pendapatnya dianggap kurang lengkap. Berbeda dengan Andrain yang lebih lengkap. Oleh karena itu, berikut ini dikemukakan secara rigkas kelima sasararn legitimasi menurut Andrain.

Apabila pengertian legitimasi dilihat sebagai dukungan yang diberikan oleh masyarakat, kelima objek legitimasi memiliki hubungan yang kumulatif. Artinya, kalau objek pertama tidak mendapat dukungan, objek kedua, dan seterusnya tidak akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini disebabkan sifatnya yang hirarkis, yakni objek kelima ditentukan dengan objek keempat, objek keempat ditentukan objek ketiga, demikian seterusnya.

Yang dimaksud dengan legitimasi terhadap komunitas politik ialah adanya kesedian para anggota masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok yang berbeda latar belakang untuk hidup rukun sebagai komunitas. Apabila masih terdapat berbagai upaya didalam masyarakat baru (separatisme), legitimasi terhadap komunitas politik dapat dikatakan masih rendah. Hal ini berarti dukungan terhadap konstitusi (hukum dan rezim), lembaga politik, pemimpin politi, dan kenbijakan yang dibuat juga masih rendah.

Apabila dukungan terhadap komunitas politik belum cukup tinggi, dalam masyarakat terdapat masalah penciptaan identitas nasional (krisis identitas). Kalau dalam masyarakat belum terdapat dukungan yang bulat terhadap hukum, dalam masyarakat terdapat krisis konstitusi. Manakala dukungan terhadap lembaga-lembaga politik masih lemah, dalam masyarakat terdapat krisis kelembagaan. Krisis kepemimpinan akan terjadi pada masyarakat yang kurang mempercayai para pemimpin-pemimpin politik. Jadi, krisis kebijakan akan terjadi apabila masyarakat menilai kebijakan pemerintah hanya menguntungkan sekelompok kecil. Dengan demikian, kelima objek legitimasi kurang mendapat pengakuan dan dukungan dari masyarakat. Lalu sistem politik akan menghadapi krisis legitimasi.⁵⁹

3. Tipe-Tipe legitimasi

Salah satu bukti dari kemajuan kajian legitimasi bisa dilihat dari beragamnya tipologi yang sudah dihasilkan para ilmuwan sosial dan ilmuwan politik. Hasil investigasi sejumlah karya ilmiah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Bila dicermati secara seksama terdapat empatbelas tipologi legitimasi yaitu:

1) Legitimasi Karismatik

Legitimasi karismatik adalah kekuatan yang secara logis menuntut identitas antara rakyat dan dengan orang yang mewakilinya sehingga rakyat itu percaya bahwa pemimpin mereka tersebut berbicara atas nama rakyat dan rakyat menerimanya sebagai pemimpin yang istimewa.

⁵⁹Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, h. 120

2) Legitimasi *Nominous*

Legitimasi *nominous* adalah keabsahan seorang pemegang kekuasaan yang diperoleh karna adanya suatu doktrin teologi yang menyatakan bahwa kekuasaan hanya sah bila dipegang oleh seorang raja yang merupakan keturunan dewa karna kerajaan itu sendiri merupakan kerajaan dewa. Doktrin ini menjamin kekuasaan dan kesinambungan raja baru.

3) Legitimasi Sipil

Legitimasi sipil adalah legitimasi yang timbul bila suatu sistem pemerintahan berdasarkan pada persetujuan dari setiap anggota yang merupakan sistem otonom dan sama kedudukannya dengan tujuan untuk sebuah kebaikan dan kepentingan bersama.

4) Legitimasi Tradisional

Legitimasi ini masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemerintahan tersebut merupakan keturunan pemimpin, berdarah biru, yang di percaya harus memimpin masyarakat. Tradisi ini slalu terpelihara dan dilembagakan oleh pemimpin itu bersama keturunannya.

5) Legitimasi Idiologi

Masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintah karena pemimpin tersebut dianggap sebagi penafsir dan pelaksana idiologi. Idiologi yang di maksud tidak hanya yang doktriner seperti komunisme, tetapi juga yang pragmatis seperti liberalisme dan gabungan keduanya seperti idiologi pancasila.

6) Legitimasi Kualitas Pribadi

Masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintah karena pemimpin tersebut memiliki kualitas pribadi berupa kharisma

maupun penampilan pribadi dan prestasi cemerlang dalam bidang seni budaya tertentu.

7) Legitimasi Prosedural

Masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut mendapatkan kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

8) Legitimasi Instrumental

Masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan material kepada masyarakat.

9) Legitimasi Geografik

Legitimasi ini diperoleh kalau rakyatnya mengakui kenyataan geografik yang ditetapkan negara itu dan menerima tempat mereka didalam negara itu. Kalau menentang, warganegara itu akan melakukan cara-cara konstitusional. Kalau rakyat tidak bersedia memberikan legitimasi geografik pada negara, maka perpolitikan demokratik akan terancam. Dalam kasus ekstrim, anacaman bisa berwujud gerakan separatis yang dilakukan warga negara kepadan pemerintahan.

10) Legitimasi Politik

Ini berkaitan dengan seberapa jauh para pemilih memandang pemerintahanya. Secara sederhana, suatu pemerintahan dianggap memiliki legitimasi politik kalaun ia memperoleh dukungan suara mayoritas dalam pemilu yang dilaksanakan dengan bersandar pada asas langsung, jujur, adil, dan

demokratik.⁶⁰ Pemahaman ini ingin mengatakan bahwa legitimasi politik suatu rezim sangat bergantung pada dukungan mayoritas elektoral dari seluruh penduduk dewasa, dan didukung dengan proses penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, adil, akuntabel dan demokratik.

11) Legitimasi Hukum

Legitimasi hukum yang berarti bahwa tindakan penyelenggara negara sesuai dengan norma hukum konstitusional. Hal ini berarti berbagai tindakan penyelenggara negara, baik berupa UU maupun lainnya, yang melanggar konstitusi secara hukum tidak wajib ditaati.

12) Legitimasi Sosiologis

Legitimasi sosiologis yang berarti tindakan atau kebijakan penyelenggara negara itu dinilai bermanfaat dan diterima oleh masyarakat secara luas.

13) Legitimasi Moral

Legitimasi moral berkaitan bahwa tindakan dan kebijakan penyelenggara negara dilakukan untuk mencapai tujuan yang dapat dibenerkan secara moral. Misalnya, mewujudkan kehidupan publik yang lebih baik atau bentuk keadilan lainnya.

14) Legitimasi Religius

Legitimasi religius ialah agar penguasa menunjukkan mutu mental atau sikap budi yang merupakan prasyarat kemampuannya untuk berhubungan dengan alam gaib. Ia harus membuktikan diri sebagai berbudi luhur, ia harus bersikap bijaksana, murah hati dan adil.⁶¹

⁶⁰Loekman Soetrisno dkk, *Menuju Masyarakat Madani, strategi dan Agenda Reformasi*, (Jakarta: P3PK, 1998), h. 100

⁶¹ Franz Magnis suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1994),h.43

BAB IV

KEKUASAAN DAN LEGITIMASI POLITIK ISLAM MENURUT

PERSPEKTIF PEMIKIRAN IBNU KHALDUN

A. Dasar Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kekuasaan Dan Legitimasi Politik

Kitab *Muqaddimah*, merupakan karya terbesarnya dan pedoman utama dalam membahas pemikiran Ibn Khaldun, kajian yang dikandungnya begitu meluas dan mendalam tentang kesejarahan dan sosiologi, politik pemerintahan dan ilmu keIslaman yang mendalam. Para pengikut Ibnu Khaldun cenderung menganggapnya sebagai ensiklopedia.

Kitab *At-ta'rif* Ibnu Khaldun *wa rihlatuhu Garban wa syarqan* adalah kitab otobiografi Ibnu Khaldun secara lengkap yang memandangnya sebagai orang besar abad pertengahan yang paling sempurna.⁶² Karya Ibnu Khaldun yang lain adalah *Burdha Al-Bushairi*, tentang logika dan aritmetika dan beberapa resume ilmu fiqih. Dua karya Ibnu Khaldun yang masih sempat dilestarikan, yaitu sebuah ikhtisar yang masih ditulis beliau dengan tangan sendiri dengan judul *Lubab Al-Muhashal fi Ushul Ad-din* dan kitab *Syifa As-Sailfitahdzib Al-Masatt* yang ditulisnya ketika berada di Fez. Tentang *lubab al-muhashal fi ushul ad-din* berbicara tentang teologi skolastik, dan karya *syifa as-sailfitahdzib al-masatt* berbicara tentang sufisme konvensional.⁶³

⁶²Ayi Sofyan, *Kapita Selekta Filsafat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 237

⁶³*Ibid*, h. 273-274

Karya ini Ibnu Khaldun menyandarkan diri pada pengetahuan agama dari arkeologi pemahaman kaum agamawan yang mendahuluinya. Beranjak dari sejarah dan menafsirkan sejarah itu secara *real*. Sebagaimana dalam diri seorang pemikir politik berkembang ilmu sejarah rezim penguasa serta masalah-masalah kekuasaan lainnya yang hadir dalam tubuh kerajaan- kerajaan Islam pada masaitu.

Tentang pemikiran dalam karya *Muqaddimah* Ibnu Khaldun mengenai kekuasaan dan legitimasi politik membahas mengenai solidaritas sosial sebagai awal terbentuknya kekuasaan namun belum menunjukkan kekuatan yang mengikat sebelum lahirnya seorang pemimpin yang mampu menggerakkan kekuatan-kekuatan itu. Penulis tidak hendak menjelaskan secara rinci dari karya *Muqaddimah* namun adalah untuk memperoleh kajian tentang kekuasaan dan legitimasi politik yang didalam karya tersebut dijelaskan dalam pasal-pasal dan sub-subnya terutama mengenai solidaritas sosial sebagaimana yang telah disebutkan diatas hingga pada lahirnya lembaga-lembaga kekuasaan serta dasar pembentukan kelembagaan tersebut sebagai bukti legitimasiformal.

Corak pemikiran Ibnu Khaldun secara umum adalah sebagai seorang pemikir yang berangkat dari produk sejarah, untuk membaca pemikirannya aspek historis yang mengitarinya tidak dapat dilepaskan begitu saja. Akan tetapi jelas, pemikiran Ibnu Khaldun tidak dapat dilepas dari pemikiran Islamnya. *Muqaddimah* yang merupakan manifestasi pemikiran Ibnu Khaldun dapat dibaca melalui setting sosial yang mengitarinya dan yang diungkapannya, baik secara lisan maupun tulisan sebagai sebuah kecenderungan.⁶⁴ Sebagaiman yang telah

⁶⁴Ayi Sofyan, *Kapita Selekta Filsafat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 171

dideskripsikan oleh Ayi Sofyan mengenai sekilas corak pemikiran Ibnu Khaldun tentang fenomena alamiah yang juga menjelaskan tentang konsep keadilan sosial. Konsep keadilan sosial merupakan keadilan yang didasarkan pada norma-norma dan nilai-nilai agama, terlepas dari nilai yang mengejutkan dalam hukum dan politik dipersiapkan untuk menerima melalui adat kebiasaan, sikap positif atau lainnya.

Bagi para Teolog dan filsuf muslim, keadilan adalah suatu konsep yang abstrak dan idealis, diungkapkan dalam istilah-istilah yang unggul dan sempurna. Mereka tidak berusaha serius melihat keadilan sebagai suatu konsep yang positif serta menganalisisnya dari sudut kondisi-kondisi sosial yang ada.⁶⁵ Sementara Ibnu Khaldun memiliki konsep keadilan yang dikaji secara realis.

Dalam *Muqaddimah*-nya keadilan didiskusikan sebagai suatu konsep sosial dalam konteks suatu teori tentang masyarakat yang prosesnya ditentukan oleh faktor-faktor sosial yang melampaui kontrol seorang manusia. Ibnu Khaldun sangat menekankan arti keadilan yang berangkat dari aspek kekuatan sosial dengan konsep purnama. Dalam agama pada hakikatnya, prinsip-prinsip ajaran agama Islam tidak terbatas pada ajakan agar manusia mengikuti kebenaran atau memperhatikan jiwa hanya dalam kaitannya dengan siyاق spiritual (*spiritual context*) yang menyangkut hubungan antara dunia ini dengan dunia lain yang akan datang.

Prinsip-prinsip ajaran Islam menyangkut masalah hubungan sesama mukmin, menjelaskan hukum secara umum dan juga secara terperinci,

⁶⁵Sofyan, *Kapita Selekta Filsafat*, h. 280

merumuskan makna penguasa eksekutif yang melaksanakan hukum, menentukan sanksi-sanksi hukum beriku persyaratan-persyaratan yang membaasi pelaksanaannya, juga mengemukakan tujuan yang unik bahwa pemegang kekuasaan itu harus lah orang-orang yang paling taat kepada aturan-aturan tentang kekuasaan yang diperoleh tidak lantaran pewarisan ataupun karena kehebatan ras, suku, kekuatan material, dan kekayaannya. Ia memperoleh kekuasaan itu hanya jika dia menaati ketentuan-ketentuan hukum suci itu, mempunyai kekuatan untuk melaksanakannya, dan jika dia disepakati oleh masyarakat. Jadi sebenarnya, penguasa kaum muslimin adalah hukum agama mereka yang suci dari tuhan yang tidak membeda-bedakan rakyatnya. Ini juga bisa merupakan rangkuman dari gagasan Islam tentang bangsa itu. Penguasa muslim tidak memiliki kelebihan apapun selain daripada kenyataan bahwa dialah yang paling bersemangat diantara yang lain dalam mengamankan dan mempertahankan hukum tuhanitu.

Memahami konsep kekuasaan politik yang menjadi tafsir Ibnu Khaldunselanjutnya. Dalam ilmu sosiologi Ibnu Khaldun banyak berbicara tentang transformasi sosial dan perubahan sosial dalam masyarakat. Sebagaimana kekuasaan diperoleh, direbut dan dipertahankan oleh masyarakat nomaden yang berbeda dengan masyarakat menetap juga memiliki nilai-nilai yang berbeda dalam mengelolah kekuasaan yang dimilikinya.⁶⁶ Konsep yang dibangun dalam ilmu sosiologi Ibnu Khaldun menawarkan konsep '*ashabiyah* yang kemudian menjadi suatu metode baca yang digunakannya dalam mengamati transformasi dan proses perubahan sosial dalam masyarakat.

⁶⁶Dr. Syarifuddin Jurdi, *Awal Mula Sosiologi Modern Kerangka Epistemologi, Metodologi, Dan Perubahan Sosial Perspektif Ibn Khaldun*, (Jakarta : Kreasi Wacana, 2012), h. 103

'Ashabiyah dalam pemikiran Ibnu Khaldun memiliki konotasi positif yakni sebagai piranti solidaritas sosial ataupun kesetiakawanan sosial kelompok dan suku. Ibnu Khaldun sendiri sebenarnya menyadari makna negatif dari konsepnya tentang *'ashabiyah* dan banyak pihak menuduh konsep itu sebagai pemicu konflik atau kekerasan antar suku. Namun demikian, *'ashabiyah* dimaknai sebagai upaya untuk mempersiapkan masyarakat menuju pada perubahan dalam struktur sosial dan politik serta perubahan pada level kultur dan kebudayaan. Dengan *'ashabiyah* tersebut, masyarakat menuju pada kemajuan, menurut Ibnu Khaldun semakin kuat *'ashabiyah* dalam suatu komunitas akan meningkatkan komitmen suatu masyarakat, sebaliknya semakin rendah dan longgarnya *'ashabiyah* akan membawa pada konflik dan dis-integrasi sosial.⁶⁷

Konsep solidaritas alamiah inilah yang menjadi dasar perilaku politik masyarakat dalam kaca mata Ibn Khaldun. Tentang kekuasaan politik dan legitimasi politik hingga sampai pada lahirnya sebuah negara politik. *'Ashabiyah* menjadi penopang dalam membentuk kekuasaan untuk mencapai tujuan yang telah dicita- citakan secara berkesinambungan atau dalam artian lahir menjadi sebuah ideologi perjuangan suatu kelompok atau suku tertentu.

Selain latar belakang konsep sosiologi yang bangun Ibn Kaldun, beliau juga memiliki pengetahuan sejarah yang menopang pemikirannya tentang politik Islam. Sejarah merupakan hal yang bisa mengantar seseorang ada realitas yang sesungguhnya olehnya itu Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sejarah harus ditulis seriil mungkin tanpa ada kepentingan yang melatarbelakanginya. Dalam sejarah pemerintahan Islam, Ibnu Khaldun menyaksikan masa transisi pemerintahan Islam dan jatuh banggunya pemerintahan Islam dibeberapa daerah baik yang dipicu permasalahan internal pemerintahan sendiri maupun sebab eksternal.

Biografi perjalanan Ibnu Khaldun dalam dunia politik dapat dilihat pada latar belakang tempat dimana Ibnu Khaldun meniti karirnya. Ibnu Khaldun

⁶⁷Dr. Syarifuddin Jurdi, *Awal Mula Sosiologi Modern Kerangka Epistemologi, Metodologi, Dan Perubahan Sosial Perspektif Ibn Khaldun*, (Jakarta : Kreasi Wacana, 2012), h. 79

menghabiskan lebih dari dua pertiga umurnya dikawasan Afrika Barat Laut yang sekarang ini berdiri negara-negara Tunisia, Aljazair, dan Maroko serta Andalusia yang terletak di ujung selatan spanyol. Pada zaman Ibn Khaldun, kawasan ini tidak pernah menikmati stabilitas dan ketenangan politik, sebaliknya merupakan kancan perebutan kekuasaan antar dinasti dan juga pemberontakan sehingga kawasan itu atau sebagian darinya sering berpindah tangan dari satu dinasti kedinasti lainnya dalam rentang waktu itulah Ibnu Khaldun meniti karir dan lebih dari sepuluh kali dia berpindah jabatan.⁶⁸ Hal inilah yang diamati Ibnu Khaldun dan dituangkan dalam karyanya *Muqaddimah*. Seiring dengan perkembangan konsep sosiologi, sejarah dan agama diintegrasikan dalam pemikiran politik Ibnu Khaldun.

Dalam hal legitimasi politik, hukum, pemerintahan dan kepemimpinan Ibnu Khaldun selalu berangkat dari realitas sosial politik dalam sejarah pemerintahan Islam. Ibnu Khaldun ketika berbicara mengenai khalifah ini tidak melepaskan diri dari peristiwa sejarah dimana ke empat Khulafur Rasyidin telah berhasil menciptakan suatu tatanan sosial politik yang lebih modern.⁶⁹ Artinya sandaran kajian Ibnu Khaldun merujuk pada implikasi sosial dalam proses perubahan menuju konsep Islam yang lebih matang.

Terkait dengan konsep-konsep umum tentang kekuasaan dan negara dengan pendekatan sosiologi politik Ibnu Khaldun dengan sandarannya adalah masyarakat dan negara. Namun harus dipahami bahwa konsep masyarakat dan

⁶⁸H. Munawir Sjadzali, M.A, *Islam Dan Tatanegara : ajaran, sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta UI Press, ed V 1993), h. 93

⁶⁹Dr. Syarifuddin Jurdi, *Awal Mula Sosiologi Modern Kerangka Epistemologi, Metodologi, Dan Perubahan Sosial Perspektif Ibn Khaldun*, (Jakarta : Kreasi Wacana, 2012), h. 164

negara itu tidak lepas dari standar nilai yang dibangun dari kehidupan kemasyarakatan sebelumnya, olehnya itu peradaban adalah cita-cita tertinggi masyarakat bernegara. Maksudnya adalah negara bukan hanya sekedar mengatur hubungan masyarakatnya akan tetapi bagaimana nilai perjuangan dapat dipahami sebagai ideologi sehingga disini kita tidak bisa melepaskan tentang pola pikir yang menyertai perkembangan masyarakat itu sehingga selain dari pendekatan sosiologi politik kita juga tidak bisa melepaskan tentang kajian filosofinya.

B. Kekuasaan Politik Menurut Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun

Dalam kitab *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun membicarakan istilah '*Al-Mulk*' yang dapat diinterpretasikan sebagai gambaran perenungan Ibnu Khaldun tentang kondisi sosial politik di negara-negara Arab Islam yang sering dililit konflik antar elit kekuasaan. Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun sebenarnya terbentuk melalui suatu kemenangan kelompok tertentu atas kelompok lainnya.

Kekuasaan itu merupakan kedudukan yang menyenangkan, meliputi berbagai kesenangan materi maupun maknawi, material maupun spiritual, sehingga untuk memperoleh suatu kekuasaan itu melalui kompetisi-kompetisi menggemparkan dan hanya sebagian kecil orang yang rela menyerahkannya. Kekuasaan merupakan jabatan, kedudukan yang alami bagi manusia. Sebab, manusia tidak mungkin dapat melangsungkan hidupnya dan melanggengkan eksistensinya kecuali dalam sistem kemasyarakatan dan saling membantu diantara mereka dalam upaya memperoleh kebutuhan-kebutuhan pokok.⁷⁰

⁷⁰Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pusataka Firdaus, 2001), h.328

Sebagaimana diketahui bersama, raja merupakan pemegang tahta kekuasaan tertinggi didalam sebuah negara. Raja/Sultan memiliki beberapa simbol dan atribut yang menjadi tuntutan kewibawaan dan kebesarannya yang dikhususkan baginya. Dengan mengenakannya, ia akan tampil berbeda dari rakyat, pengiring dan para pemimpin lain dalam daulahnya.

Ibnu Khaldun memberikan tipologi terbentuknya pemerintahan yakni: *Pertama, Al-Mulk* natural Artinya, seorang raja dalam memerintah lebih mengikuti keegoisan dan hawanafsunya sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Pemerintahan jenis ini menyerupai pemerintahan otoriter, individualis, otokrasi, atau inkonstitusional. *Kedua, Al Imamah* yaitu pemerintahan yang membawa kemaslahatan bagi semuarakyat baik yang bersifat keduniawian maupun keukhrawian. Menurut Ibnu Khaldun model kedua inilah yang terbaik, karena dengan hukum yang bersumber dari ajaran agama akan terjamin tidak sajak keamanan dan kesejahteraan di duniatetapi juga di akhirat. Dan karenayang dipakai sebagai asaskebijaksanaan pemerintahan ituadalah ajaran Agama, khususnya Islam, maka kepala Negara disebut Khalifah dan Imam.⁷¹

Implementasi kekuasaan politik dalam Islam dapat dikaji berdasarkan sejarah dari periode pertengahan (1250-1800) dan mencari bentuk penerapan kekuasaan politik itu di abad kontemporer. Praktek-praktek kekuasaan sepanjang sejarah ummat Islam pasca Rasulullah sarat dengan perdebatan mengenai bagaimana politik itu dijalankan. Hal ini mengakibatkan adanya pemikiran pada abad modern untuk merujuk pada Islam periode Rasulullah dalam hal politik dan pemerintahan.

⁷¹Djiauddin Rais, *Teori PolitikIslam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.86-89

Ummat Islam telah melihat dalam sejarah mereka beberapa pemerintahan dinasti yang besar tetapi tidak luput dari pergolakan dan perebutan kekuasaan politik. Akibatnya, konsekuensi logis dari hal tersebut, sejarah mencatat ummat Islam dan perkembangan pemikiran mereka menghadirkan konsepsi politik yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang dan pendekatan yang digunakan, bahkan ada yang berpendapat bahwa Islam tidak memerlukan sistem politik seperti apa yang dikenal ummat Islam itu sendiri.

Masuk kepada inti dari konsep kekuasaan menurut Ibnu khaldun sebagaimana yang dipaparkan oleh Syaifuddin Jurdi bahawa masalah kekuasaan merupakan salah satu bagian penting dari kehidupan masyarakat, dan kekuasaan merupakan derajat yang lebih tinggi dari pencapaian kehidupan bernegara. konsep ini lah yang mesti harus ditelusuri agar mampu memahami tentang lahir dan berkembangnya sebuah kekuasaan dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan dalam sebuah negara.

Ibnu Khaldun menggambarkan dalam buku *Muqaddimah* bahwa dalam sejarah peradaban bangsa-bangsa yang menghantarkan seorang manusia pada apa yang menjadi sifat khas yang melekat pada dirinya yaitu mencari kehidupan dan sifat alamiah dasar manusia adalah agar tidak menjadi punah sehingga membutuhkan makanan, menghindari binatang yang mematikan agar bisa melanjutkan hidup yang lebih layak, serta bekerja sama dengan manusia lainnya sebab tanpa bantuan orang lain manusia tidak akan bertahan hidup. Setelah tercipta sebuah peradaban maka manusia butuh seseorang yang akan mengatur dan memimpin mereka dan harus memiliki kekuatan dan wibawa untuk mereka

patuhi. Dari sinilah kekuasaan (*mulk*) itu lahir. Ibnu Khaldun selalu berangkat dari hal-hal yang alamiah dan melihat manusia dari fitrahnya.

Ibnu Khaldun beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang berpolitik karena manusia adalah makhluk yang berfikir dan karena berfikir maka manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat kebajikan dan bukan keburukan sebagaimana binatang yang tidak berfikir. Jadi kekuasaan politik adalah fitrah manusia yang telah diberikan khusus kepada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk ciptaannya yang lain.

Kedaulatan dan kekuasaan politik datang kepada manusia karena keduanya merupakan salah satu ciri yang membedakannya dengan binatang. Berarti sifat-sifat baik yang ada pada manusia, itulah yang sesuai dengan kedaulatan dan kekuasaan politik. Sedangkan kebijakan itulah yang sesuai untuk kekuasaan politik.⁷² Dalam hal ini kekuasaan identik dengan hal-hal yang baik sebab keburukan tidak akan pernah menciptakan kekuasaan selain untuk kejahatan itu sendiri. Keburukan hanya menjadi penghancur bagi kekuasaan, sementara kekuasaan merupakan jaminan tuhan untuk ummat manusia dan merupakan perwakilan tuhan untuk melaksanakan hukum-hukumnya.

Dilihat dari gambaran diatas pemikiran Ibnu Khaldun tentang kekuasaan maka yang muncul adalah solidaritas sosial yang harus kita pahami yang lahir secara alamiah sebagai wujud kemanusiaan yang di anugerahkan oleh Allah SWT. Fenomena alamiah yang merupakan corak pemikiran Ibnu Khaldun nampaknya mendominasi sebagai landasan dalam memaparkan tentang kekuasaan.

⁷² Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Terj. Ahmadi Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001),h. 171

Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun terbentuk dari kemenangan atas kelompok tertentu dengan kelompok yang lain. Kekuasaan itu merupakan kedudukan yang menyenangkan, meliputi *maddi* maupun *maknawi*, material maupun sepirtual sehingga untuk mendapatkannya harus melalui kompetensi dengan prestise yang dimilikinya. Jadi kekuasaan merupakan sesuatu yang bebas diperebutkan baik secara kelompok maupun perorangan.

Dalam hubungan penguasa dan kekuasaan, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa kehidupan bersama dalam suatu negara memerlukan penguasa yang ditaati. Tanpa penguasa masyarakat berada dalam situasi yang kacau, penuh anarki, dan pada akhirnya akan mengancam eksistensi manusia. Ibnu khaldun berpendapa bahwa kepentingan rakyat pada penguasa bukan pada diri dan tubuhnya, seperti bentuk badannya, luas ilmunya dan ketajaman otaknya. Keperluan mereka terletak pada hubungan dia dengan mereka. karena itu penguasa dan kekuasaan bersifat relasional yang seimbang antara kedua belah pihak, penguasa memiliki rakyat dan rakyat memeiliki penguasa.⁷³ Penguasa disini adalah seseorang yang dipercaya oleh rakyat untuk mengarahkan dan mengurus mereka didalam kehidupan bersama. Relasi hubungan antara masyarakat dan pemimpin sekarang dikenal dengan relasi demokrasi. Ibnu khaldun juga berpendapat bahwa ada beberapa tipe kekuasaan yaitu *siyaasahthaabi'iyah* (kedaulatan yang alami yang muncul didalam komunitas), *siyasah aqliyyah* (kekuasaan yang dirancang oleh orang cerdas dan pandai), *siyasah diniyah* (kekuasaan yang berdasarkan pada hukum).

⁷³ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik, Perbandingan Antara Islam Dan Barat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997),h.102

C. Legitimasi ‘Ashabiyah Menurut Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun

Secara etimologis ‘ashabiyah berasal dari kata ‘ashaba yang berarti mengikat. Secara fungsional ‘ashabiyah menunjuk pada ikatan sosial budaya yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Selain itu, ‘ashabiyah juga dapat dipahami sebagai solidaritas sosial, dengan menekankan pada kesadaran, kepaduan dan persatuan kelompok.⁷⁴

Menurut Muhammad Mahmud Rabie’, ‘ashabiyah merupakan suatu jalinan sosial yang dapat membangun kesatuan suatu bangsa, terlepas apakah itu dipengaruhi oleh ikatan kekeluargaan maupun persekutuan. Dalam peran sosial, ‘ashabiyah dapat melahirkan persatuan yang dapat dibagi ke dalam dua kelompok. *Pertama*, menumbuhkan solidaritas kekuatan dalam setiap jiwa kelompok. *Kedua*, keberadaan ‘ashabiyah dapat mempersatukan berbagai ‘ashabiyah yang bertentangan, sehingga menjadi suatu kelompok yang lebih besar dan utuh.⁷⁵

Seperti yang dikatakan Ibnu Khaldun dalam bukunya *Muqaddimah*, bahwa ‘ashabiyah sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu negara, dinasti, ataupun kerajaan. Tanpa dibarengi ‘ashabiyah maka keberlangsungan dan eksistensi suatu negara tersebut akan sulit terwujud, serta sebaliknya, negara tersebut berada dalam ancaman disintegrasi dan kehancuran.

Ibnu Khaldun menempatkan istilah ‘ashabiyah menjadi dua pengertian. Pengertian pertama bermakna positif dengan menunjuk kepada konsep

⁷⁴ Jhon L. Espasito, *Ensiklopedia Dunia Islam Modern*, Jilid I, (Bandung: Mizan, 2001), h.165

⁷⁵ Muhammad Mahmud Rabie, *The Political Theory Of Ibnu Khaldun*, (Leiden: E. J. Brill, 1967), h.165

persaudaraan (*brotherhood*). Dalam sejarah peradaban islam konsep ini membentuk solidaritas sosial masyarakat islam untuk saling bekerjasama, mengesampingkan kepentingan pribadi, dan memenuhi kewajiban kepada sesama. Semangat ini kemudian mendorong terciptanya keselarasan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang kebangkitan dan kemajuan perdaban.

Pengertian kedua bermakna negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran. Konteks pengertian yang kedua inilah yang tidak dikehendaki dalam sistem pemerintahan islam. Karena akan mengaburkan nilai-nilai kebenaran yang diusung dalam prinsip-prinsip agama. Mengenai alasan diperlukannya *'ashabiyah* tersebut, Ibnu Khaldun mengemukakan dua premis penting. *Pertama*, dalam teori tentang berdirinya negara berkenaan dengan realitas kesukuan. Ia berpendapat bahwa orang tidak mungkin mendirikan negara tanpa didukung persatuan dalam solidaritas yang kuat.⁷⁶ Didalamnya terdapat ajakan untuk senantiasa waspada dan siaga sepenuh jiwa dan raga untuk mempertahankan negaranya. *Kedua*, bahwa proses mendirikan negara itu harus melalui perjuangan yang keras dan berat, dengan mempertaruhkan nyawa. Kalau dirinya tidak mampu menundukkan lawan maka dirinya sendiri yang akan kalah atau binasa. Oleh sebab itu, dibutuhkan

⁷⁶ A. Rahaman Zainuddin, *Kekuasaan Dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h.160. teori *'ashabiyah* ini menunjukkan realitas sejarah sebagai ajang kerja sama dan saling tolong mnolong untuk kepentingan bersama dalam membangun negara dan kemakmuran masyarakat. Ini bertentangan dengan teori marxis yang berpandangan bahwa realitas sejarah menunjukkan pertentangan dan pertarungan dari berbagai kelas kelompok manusia. *Pertama*, berkumpulnya manusia dalam masyarakat (*al-ijtima' al-insani*), yaitu berkumpulnya suatu masyarakat merupakan fakta yang tidak bisa dibantah lagi. *Kedua*, setelah terbentuk komunitas kemudian memasuki fase pembangunan (*al-umran*). Lihat A. Rahman Zainuddin, *Pemikiran Politik Islam: Islam, Timur Tengah Dan Benturan Ideologi*, (Jakarta: Pencil-234, 2004),h.80-81

kekuatan yang besar untuk mewujudkannya. Dengan demikian, terbentuknya solidaritas ini mutlak di butuhkan.

Kemudian dalam pembentukan *'ashabiyah* tersebut, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa agama mempunyai peran penting dalam pembentukan persatuan tersebut. Menurutnya, semangat persatuan rakyat yang dibentuk dalam agama itu tidak bisa ditandingi oleh semangat persatuan yang dibentuk oleh faktor lainnya. Hal tersebut didukung oleh visi agama dalam meredakan pertentangan dan perbedaan visi rakyat, sehingga mereka mempunyai tujuan yang sama, untuk berjuang bersama menegakkan agamanya. Ini di buktikan dalam perang Yarmuk dan Qadisiyah, dimana pasukan umat islam hanya berjumlah 30.000 orang, padahal tentara Persia Qadisiyah berjumlah 120.000 orang. Sedangkan tentara Heraklitus, menurut Al-Waqidi berjumlah 400.000 orang. Meskipun jumlahnya sangat kecil, karena didasari semangat persatuan yang dibentuk oleh peran agama hasilnya umat islam mampu memenangkan peperangan tersebut.

Dalam membahas tentang legitimasi ialah bagian dari solidaritas. Solidaritas yang kuat merupakan suatu keharusan bagi banggunya suatu dinasti atau negara besar. Oleh karena itu jarang ada dinasti dapat berdiri disuatu wilayah yang terdapat berbagai macam suku. Sebab dalam keadaan yang demikian masing-masing suku mempunyai kepentingan dan aspirasi yang berbeda-beda dan tiap kepentingan dan aspirasi suku-suku tersebut didukung oleh *'ashabiyah* suku. Atau dengan perkataan lain dinasti yang besar dan kuat hanya dapat berdiri apabila terdapat homogenitas, sehingga menimbulkan solidaritas kelompok yang kuat.

Legitimasi '*ashabiyah* merupakan pengakuan yang diberikan atas dasar solidaritas terhadap sebuah kedaulatan. Sebagaimana Ibnu Khaldun mengatakan dalam *Muqaddimah* bahwa tujuan terakhir solidaritas sosial adalah kedaulatan sebabnya, karena solidaritas sosial itulah yang menyatukan usaha untuk tujuan yang sama, mempertahankan diri, menolak, atau mengalahkan musuh. Juga kita telah ketahui bahwa tiap-tiap masyarakat umat manusia memerlukan kekuatan yang berfungsi untuk mencegah, juga seorang pemimpin yang bisa mencegah manusia untuk saling menyakiti.⁷⁷

Ditinjau lebih jauh Ibnu Khaldun melihat bahwa hukum merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat. Adanya keterpautan antara hukum dengan penguasa sehingga terbentuklah Daulah. Dengan demikian hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam rumusan Ibnu Khaldun mengenai hukum, pemimpin dan masyarakat merupakan model dinamika yang terdiri atas delapan prinsip kebijaksanaan politik, yang terkait dengan prinsip yang lain secara interdisipliner dalam membentuk kekuatan bersama dalam satu lingkaran, sehingga awal dan akhir dari lingkaran tersebut dapat dibedakan, yaitu terdiri atas:

- 1) Kekuatan pemerintah tidak dapat diwujudkan, kecuali dengan implementasi hukum.
- 2) Hukum tidak dapat dilaksanakan, kecuali dengan pemeritahan.
- 3) Pemerintahan tidak dapat memperoleh kekuasaan, kecuali dari rakyat.

⁷⁷ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, h.166

- 4) Masyarakat tidak dapat ditopang, kecuali oleh kekayaan.
- 5) Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dari pembangunan.
- 6) Pembangunan tidak dapat dicapai, kecuali melalui keadilan.
- 7) Keadilan merupakan standar yang akan di evaluasi Allah kepada umatnya.
- 8) Pemerintah dibebankan dengan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan.

Jadi jelas, dalam proses terbentuknya suatu negara dan hukum diperlukan suatu legitimasi solidaritas (*'ashabiyah*) untuk mendukung ketercapaian cita-cita secara bersama serta mewujudkan keadilan dan mampu memelihara serta membangun agama. Ashabiyah lebih baik dibanding rekayasa otak manusia dalam menentukan seseorang pemimpin. Hal ini karna ashabiyah lebih dekat dengan pemimpin secara emosional dan moral sehingga untuk mengontrolnya tidak terlalu sulit.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Bin Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadhan 732 H bertepatan tanggal 27 Mei 1333 M. Nenek moyang Ibnu Khaldun berasal dari golongan Arab. Setelah Islam mengalami kehilangan kekuasaan seluruh keluarga Ibnu Khaldun pindah ke Tunisia. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan dan seorang muslim yang aktif dalam bidang politik dan hukum. Ia hidup berpindah-pindah karena konstalasi politik yang terjadi pada masa itu sehingga mengakibatkan Ibnu Khaldun harus diasingkan dan memaksanya untuk melarikan diri.

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang kekuasaan dan legitimasi berangkat dari suatu proses yang alamiah dalam diri seorang manusia. Konsep dasar atas kekuasaan selain karena sang pemilik kekuasaan mutlak hanya ada di tangan Allah SWT. juga di karenakan adanya solidaritas sosial yang memebrikan dorongan serta lahirnya suatu cita-cita yang di idamkan yaitu bekerja sama dalma memenuhi semua kebutuhan manusia termasuk hasrat kekuasaan yang ada dalama diri manusia tu sendiri. Adanya kekuatan yang di lahirkan ‘ashabiyah maka kedaulatan itu bisa dicapai, sehingga lahirlah pemerintahan dan negara

Setelah lahirnya kekuasaan serta legitimasi yang menyertainya maka lahirlah upaya untuk menjaga dan memperluas wilayah kekuasaannya. Namun setiap kedaulatan memiliki jangka waktu atau masa jaya suatu kekusaan sebab ada

proses ilmiah yang terjadi yaitu lahir, berkembang, menjadi tua, dan hancur atau direbut. Adapun yang mempercepat kehancuran sebuah kedaulatan adalah dikarenakan lemahnya solidaritas sosial, penggunaan cara-cara kekerasan dalam memegang kekuasaan, cara hidup yang berfoya-foya, serta lahirnya solidaritas sosial ('ashabiyah) yang baru dan lebih kuat dikalangan kedaulatan.

B. Saran

Demikianlah skripsi ini penulis buat, adapun hal yang menjadi saran penulis adalah:

1. Skripsi ini dibuat disamping untuk kewajiban menyelesaikan tugas akhir perkuliahan (S1), juga mengajak seluruh generasi muda islam dan seluruh kaum muslimin untuk menyampaikan pembelajaran bagaimana menggunakan kekuasaan dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan soldaritas di antara kaum muslimin demi keberlangsungan hidup yang lebih baik.
2. Penulis mengajak mahasiswa atau generasi muda untuk melanjutkan kajian penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan kekuasaan dan legitimasi guna memperluas wawasan pengetahuan dan menjadi dasar untuk membangun kedaulatan yang lebih kuat bagi umat islam.

Seandainya dalam penelitian dan penulisan ini terdapat kesalahan dan kekuarangan makal penulis berharap masukan dan kritiknya demi kelengkapan kajian tentang kekuasaan dan legitimasi ini, kesalahan dan kekurangan hanyalah datang dari penulis yang masi kurang akan ilmu, sedangkan yang maha kaya dengan ilmu dan kebenaran hanyalah milik Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Cordoba. 2017. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia
- Abdurrahman Bin Muhammad Bin Khaldun, Al-Allamah . 2011. *Mukaddimah*, Terj. Masturi Irham,Dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Abdullah, Muhammad, Enan. 2013. *Biografi Ibnu Khaldun, Terj. Machnun Husein*. Jakarta: Zaman
- Alfan Alfian, M. 2009. *Menjadi Pemimpin Politik : Perbincangan Kepemimpinan Dan Kekuasaan*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- A'la al-Maududi, Abul. 1996. *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, terj. M. al-Baqir, cet. ke-6. Bandung: Mizan
- Azhar, Muhammad . 1997. *Filsafat Politik, Perbandingan Antara Islam Dan Barat*. Jakarta: Raja Grafindo
- Aziz, Abdul. 2016. *Chiefdom Madinah: Kerucut Kekuasaan Pada Zaman Awal Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet
- Budhiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Ed. Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bierstedt, Robert . 1950. *An Analisis Of Social Power*, American Sociological Review, Volume 15, December
- Black, Antoni. 2001. *Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana
- Din Syamsuddin, M., 2001.*Islam dan Politik di Era Orde Baru*. Jakarta: Logos
- Din Syamsuddin,M., 2000. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi Dan Positioning, Ideologi Politik Di Era Demokrasi*. ed. 2. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Glasse, Cyril. 1996. *Ensiklopedia Muslim*, Terj. Gufron A, Mas'adi. Jakarta: Raja Grafindo
- Hermawan, Eman.2001.*Politik Membela Yang Benar: Teori, Kritik Dan Nalar*. Yogyakarta: Klik dan DKN Garda Bangsa

- Hidayat, Syahrul. 2015. *Mengislamkan Negara Sekuler : Partai Refah, Militer, Dan Politik Elektoral Turki*. Jakarta: Kencana
- Ikhwan Afandi, Hakimul. 2004. *Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Iqbal, Muhammad, dan Amin Husein Nasution. 2010. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Ed. Ketiga. Jakarta: Kencana
- Jurdi, Syarifuddin. 2010. *Sosiologi Islam & Masyarakat Modern: Teori, Fakta, Dan Aksi Sosial*. Jakarta: Kencana
- Jurdi, Syaifuddin. 2012. *Awal Mula Sosiologi Modern Kerangka Epistemologi, Metodologi, Dan Perubahan Sosial Perspektif Ibn Khaldun*. Jakarta : Kreasi Wacana
- J. Moleong, Lexy. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Kadir Ahmad, A. 2003. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar, Indobis Media Centre
- Kuper Dan Jessica Kuper, Adam. 2008. *Inseklopedia Ilmu-Ilmu Sosial Edisi 1-2*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Khaldun, Ibnu. 2001. *Muqaddimah*. Terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pusataka Firdaus
- L. Espasito, Jhon. 2001. *Ensiklopedia Dunia Islam Modern*, Jilid I. Bandung: Mizan
- Magnis Suseno, Franz. 1994. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia
- Mahmud Rabie, Muhammad. 1967. *The Political Theory of Ibnu Khaldun*. Leiden: E. J. Brill
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
- Rais, Djaunuddin. 2001. *Teori PolitikIslam*. Jakarta: Gema Insani
- Rahaman Zainuddin, A. 2004. *Pemikiran Politik Islam: Islam, Timur Tengah Dan Benturan Ideologi*. Jakarta: Pensil-234
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press

- Syafi'i Ma'arif, Ahmad. 1996. *Ibnu Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat Dan Timur*. Jakarta: Gema Insani Press
- Syaifuddin. 2007. *Negara Islam Menurut Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gema Media
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Suryabrata, Sumadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Cet. XIV; Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Sutrisno, Loekman. 1998. *Menuju Masyarakat Madani, Strategi Dan Agenda Reformasi*. Jakarta: P3PK
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam Dan Tatanegara : ajaran, sejarah, dan pemikiran*. Ed V. Jakarta UI Press, ed V
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas
- Syafei Ma'arif, Ahmad. 1996. *Ibnu Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat Dan Timur*. Jakarta: Gema Insani Press
- Sofyan Ayi. 2010. *Kapita Selekta Filsafat*. Bandung: Pustaka Setia
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Zainab. 1995. *Perkembangan Pemikiran Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*. Jakarta: Pustaka Firdaus

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : M. Rusdianto
Tempat Tanggal Lahir : Subulussalam, 8 Juli 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Kampung : Jl. Malahayati No. 2 Subulussalam
Alamat Medan : Jl. Brigjen Katamso Gg. Perbatasan No. 39
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
No. Hp : 0857 6018 3560

B. IDENTITAS KELUARGA

Nama orang tua
- Ayah : Subagio
- Ibu : Musraini
Saudara
- Kakak : - (Almh) Suci Anggraeni
- Abidah Ayu

C. PENDIDIKAN

SD : SD N 1 Subulussalam (2002-2008)
SMP : SMP Muhammadiyah Subulussalam (2008-2011)
SMA : SMA N 1 Simpang Kiri (2011-2014)
Perguruan Tinggi : UIN-SU Fak.Ushuluddin dan Studi Islam
Jur. Pemikiran Politik Islam (2014-2018)